



**PERENCANAAN DESTINASI WISATA MANGROVE
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL**
(Studi Deskriptif di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)

***THE PLANNING OF MANGROVE TOURISM DESTINATIONS
BASED ON LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION***
(*Descriptive Study in Mayangan Village Gumukmas District Jember
Regency*)

SKRIPSI

Oleh:

Maghfira Nurmala Sari

NIM: 150910301021

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PERENCANAAN DESTINASI WISATA MANGROVE
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL**
(Studi Deskriptif di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)

***THE PLANNING OF MANGROVE TOURISM DESTINATIONS
BASED ON LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION***
(*Descriptive Study in Mayangan Village Gumukmas District Jember
Regency*)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar sarjana

Oleh

Maghfira Nurmala Sari

Nim 150910301021

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Allhamdulillah kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Siswanto, S.H dan Ibunda tercinta Ela Widiyastuti;
2. Saudara kandungku yakni Annisa Nilam Sari dan Soca Qolbina Sari;
3. Keluarga besar H. Soeryadi dan H. Djazuli;
4. Guruku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi;
5. Para sahabat tercinta;
6. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

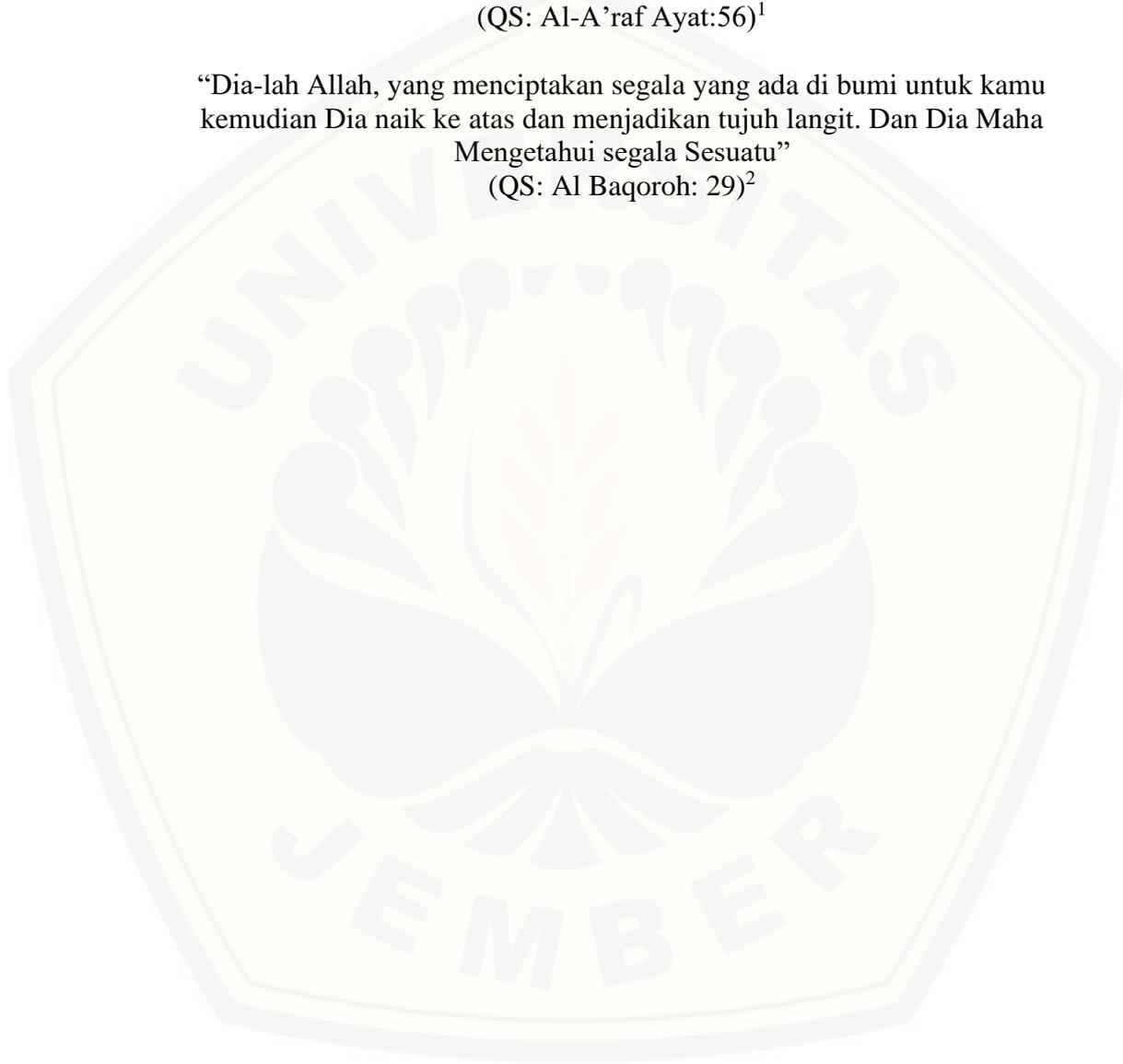
MOTTO

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(QS: Al-A'raf Ayat:56)¹

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu kemudian Dia naik ke atas dan menjadikan tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala Sesuatu”

(QS: Al Baqoroh: 29)²



¹Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Quran dan Terjemahan. Surabaya. CV Alfatih Berkah Cipta

²Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Quran dan Terjemahan. Surabaya. CV Alfatih Berkah Cipta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfira Nurmala Sari

Nim : 150910301021

Menyaakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 04 Juli 2019
Yang menyatakan,

Maghfira Nurmala Sari
Nim: 150910301021

SKRIPSI

**PERENCANAAN DESTINASI WISATA MANGROVE BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL**

Oleh:

Maghfira Nurmala Sari

NIM 150910301021

Dosen Pembimbing

Drs. Syech Hariyono, M.Si

NIP 195904151989021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perencanaan Destinasi Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal. Studi Deskriptif di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/04 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si

197001031998021001

Anggota I

Drs. Sveh Hariyono, M.Si

195904151989021001

Anggota II

Budhy Santoso, M.Si., Ph.D

197012131997021001

Arif, S.Sos., M.AP

197603102003121003

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP.196106081988021001

RINGKASAN

“Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal” di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Maghfira Nurmala Sari, 150910301021; 110 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang berada di ujung timur pulau Jawa. Kabupaten Jember berpotensi besar untuk menjadi salah satu tempat tujuan wisata, karena Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten pesisir di selatan Jawa Timur. Jember terdiri dari 31 kecamatan, enam diantaranya merupakan kecamatan pesisir. Jumlah desa pesisir yang berada dalam enam kecamatan tersebut adalah 11 desa, salah satunya yakni Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas.

Desa Mayangan memiliki potensi yang jarang di temui di daerah lain, karena Desa Mayangan merupakan satu-satunya Desa yang memiliki potensi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Jember. Potensi yang telah ada tersebut dapat dikelola dan dikembangkan menjadi wisata baru untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan potensi tersebut menjadikan faktor pendukung untuk terbangunnya suatu kawasan wisata alam. Mangrove merupakan pohon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (*intertidal trees*), ditemukan di sepanjang pantai tropis di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis masyarakat lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* dengan enam informan pokok dan tiga informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan *Non Participant Observer*, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa proses tahapan dalam persiapan perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis partisipasi masyarakat lokal. Hal yang terpenting dalam perencanaan ini yakni: partisipasi dari masyarakat lokal, anggaran untuk membangun wisata, serta legalitas tanah di kawasan wisata tersebut. Beberapa kelompok seperti Pokmaswas dan Pokdarwis juga ikut terlibat didalam perencanaan ini. perencanaan destinasi wisata yang berproses secara *bottom-up* ini diawali oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengembangkan potensi hutan mangrove sehingga nantinya akan berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian dan terwujudlah kesejahteraan didalam masyarakat terutama masyarakat di Desa Mayangan.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Hirobbila'lamin penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal (Studi deskriptif di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Drs. Syech Hariyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si , Budhy Santoso, M.Si., Ph.D , dan Arif, S.Sos., M.AP selaku Dosen Penguji Ujian Tugas Akhir.
6. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh staf Akademik dan Kemahasiswaan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya terutama kepada mas Risqi selaku operator akademik jurusan yang telah sabar membantu kelancaran administrasi penulis.
8. Ibu Sulimah, S.Pd selaku kepala Desa Mayangan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Mayangan, serta terimakasih kepada seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang telah

membantu memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.

9. Bapak Riyadi dan bapak Muchrohin selaku tokoh masyarakat di Desa Mayangan yang tidak pernah bosan menemani penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua penulis yaitu Ayah Siswanto, S.H dan Mama Ela Widiyastuti serta kedua saudari penulis Annisa Nilam Sari, S.Si dan Soca Qolbina Sari yang selalu setia mendengar keluhan dan memberikan semangat, motivasi serta doa kepada penulis.
11. Dimas Ageng Bantaran S.Kom yang selalu menyemangati dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.
12. Sahabat seperjuangan “LenjehSquad” Indah, Rey, Dinda, Gita, Nurul, Titi, Dwi dan Azizatul yang telah memberikan dukungan terutama motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Teman-teman KKN “Keluarga Bencana” Monica, Bella, Nandya, Vivi, Qiqi, Dian, Aviv, Nizar, Regi dan Reksi yang telah memberikan pengalaman serta dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman Gabut di Kosan Jawa 6 No 8a Tasya, Aulia, Nirsa, Sella dan kakak sepupu Fiqi Mely yang selalu menghibur dan menemani penulis.
15. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2014, 2015, 2016 Universitas Jember.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Kesejahteraan Sosial pada khususnya sehingga menjadi sumbangsih kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 04 Juli 2019
Penulis

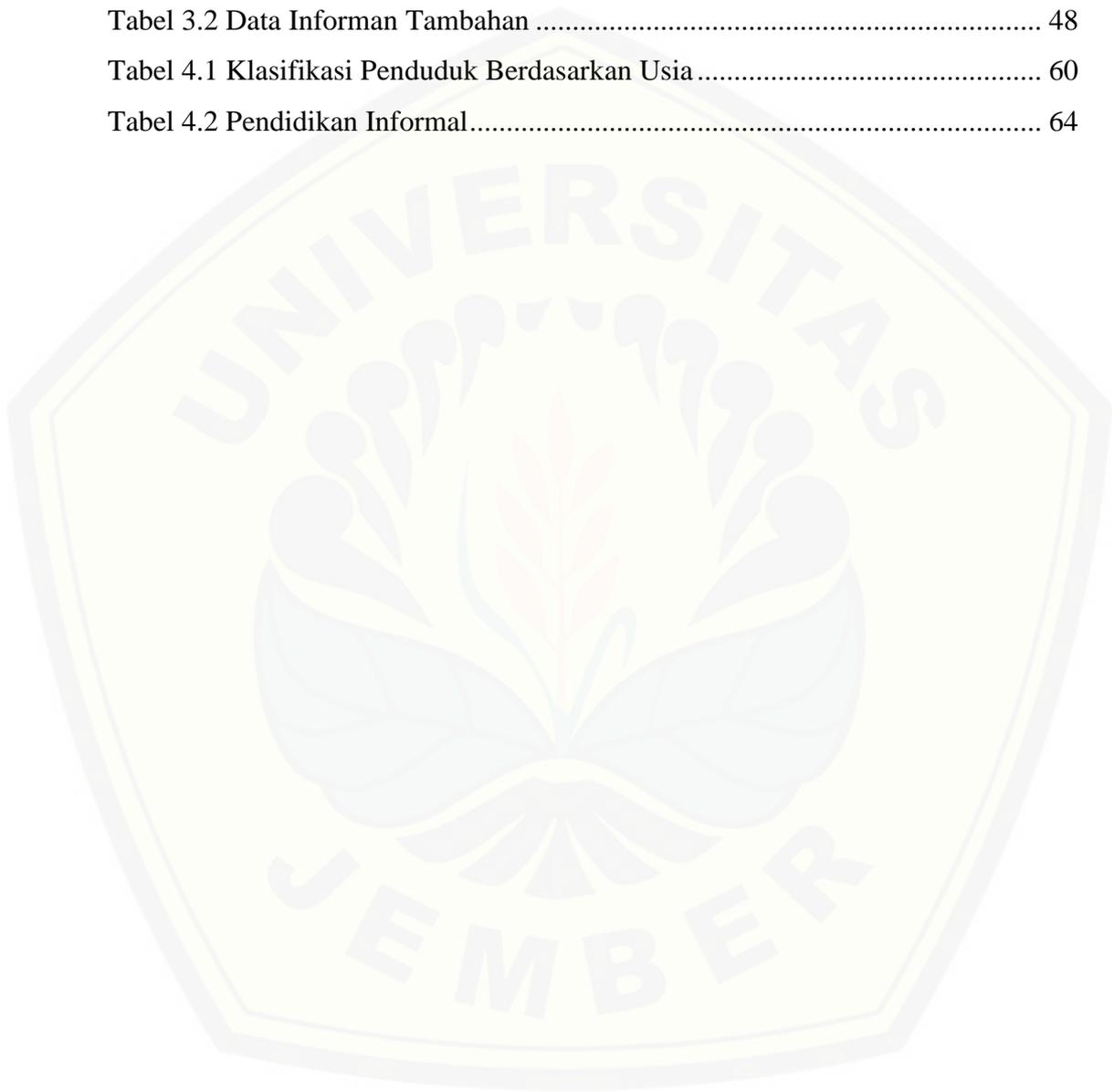
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.2 Konsep Partisipasi.....	14
2.3 Konsep Perencanaan	17
2.3.1 Perencanaan Partisipatoris	18
2.3.3 Perencanaan Program Pariwisata	29
2.4 Konsep Ekowisata Mangrove.....	32
2.5 Konsep Desa Wisata	36
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu	38
2.7 Kerangka Konseptual Teoritik	41
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44

3.2	Jenis Penelitian	45
3.3	Metode Penentuan Lokasi	45
3.4	Metode Penentuan Informan.....	46
	3.4.1 Informan Pokok.....	46
	3.4.2 Informan Tambahan.....	47
3.5	Metode Pengumpulan Data	48
	3.5.1 Observasi.....	48
	3.5.2 Wawancara.....	50
	3.5.3 Dokumentasi	52
3.6	Teknik Analisis Data	53
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	55
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Hasil Penelitian	57
	4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
	4.1.2 Dokumen Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove	65
4.2	Pembahasan	72
	4.2.1 Gambaran Umum Proses Perencanaan Dokumen	73
	4.2.2 Kendala dan Dukungan dalam Menyusun Perencanaan	77
	4.2.3 Proses Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove.....	80
BAB 5.	PENUTUP.....	104
5.1	Kesimpulan	104
5.2	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		106

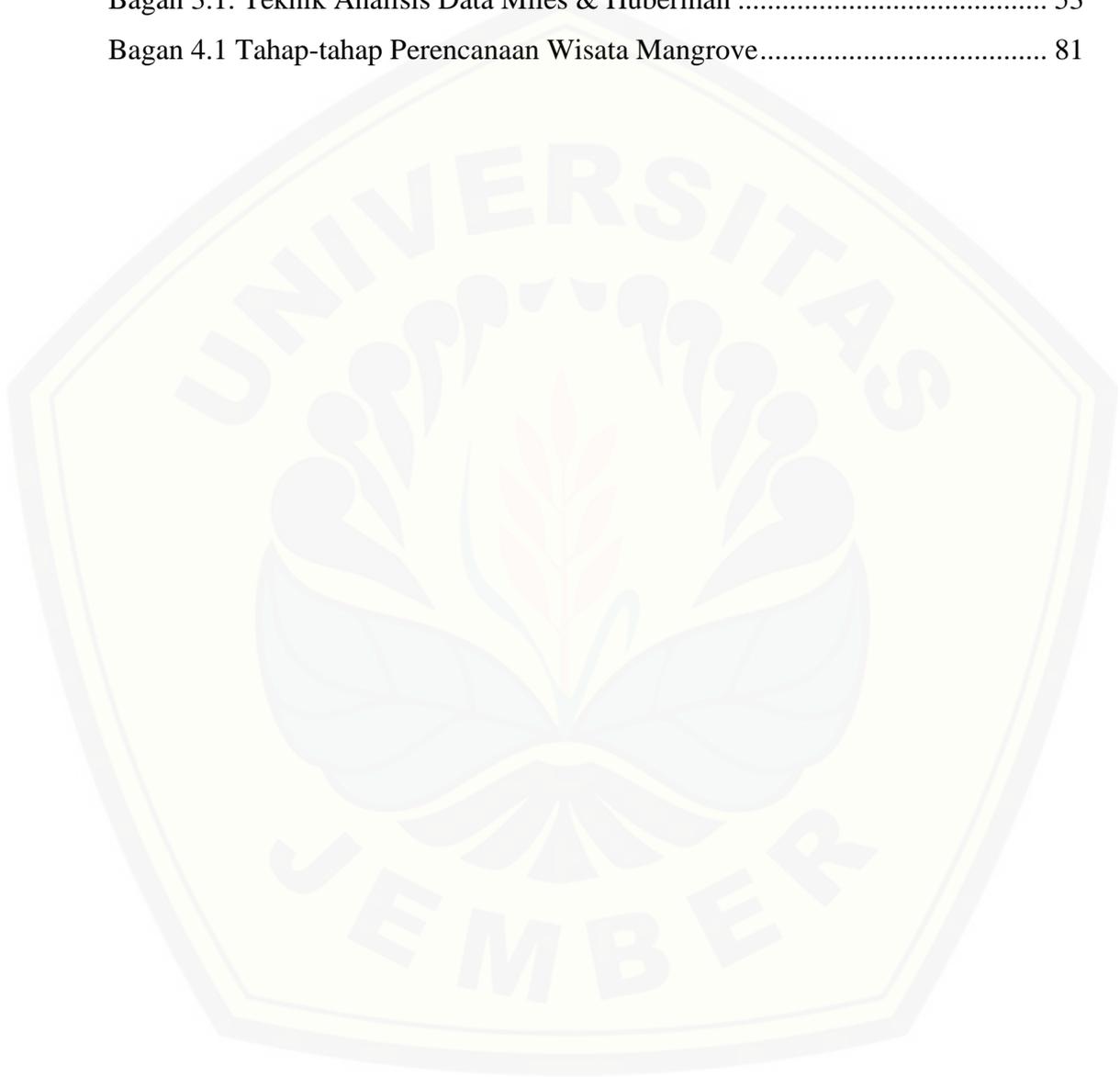
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Informan Pokok.....	47
Tabel 3.2 Data Informan Tambahan	48
Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Usia	60
Tabel 4.2 Pendidikan Informal.....	64



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Konseptual Teoritik.....	43
Bagan 3.1. Teknik Analisis Data Miles & Huberman	53
Bagan 4.1 Tahap-tahap Perencanaan Wisata Mangrove.....	81



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Desa Mayangan	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Taksonomi Penelitian

Lampiran B. *Guide Interview*

Lampiran C. Analisis Data

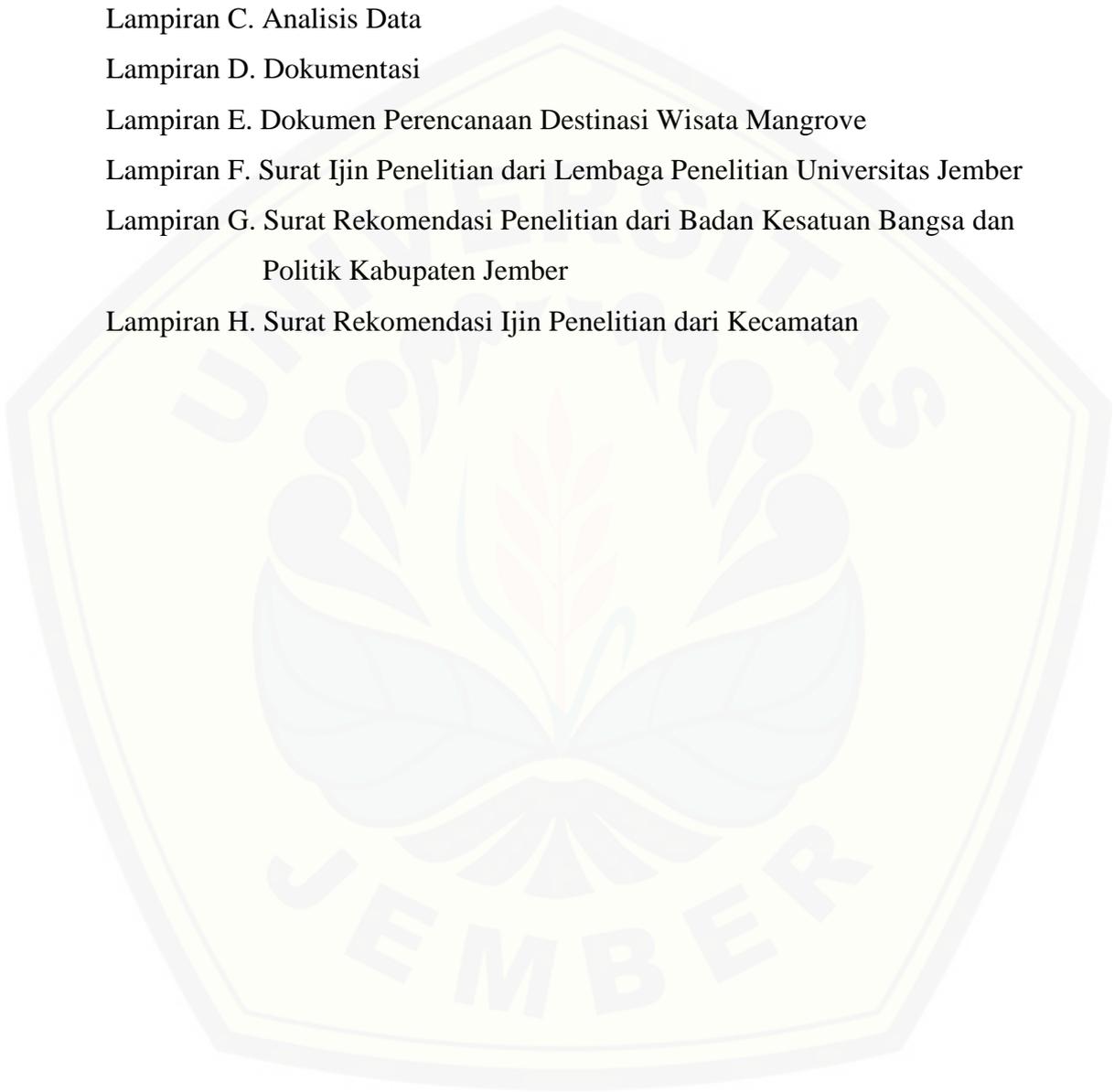
Lampiran D. Dokumentasi

Lampiran E. Dokumen Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove

Lampiran F. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

Lampiran G. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jember

Lampiran H. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Kecamatan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah perairan. Janhidros dalam (Rumampuk, 2013:54), wilayah Indonesia memiliki luas daratan sebesar 2.012.402 km² dan luas perairan sebesar 5.877.879 km². Menurut National Geographic Indonesia memiliki lebih dari 17.508 pulau yang memiliki potensi dan keunikan yang berbeda-beda. Banyaknya potensi yang tersedia seperti mangrove, ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya dapat menjadi bagian yang bisa dikembangkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan pendapatan Negara diantaranya adalah mangrove yang dapat dioptimalkan manfaatnya, sehingga dengan keragaman budaya yang ada akan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, salah satunya yakni melalui pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang selama ini masih termajinalkan sebagai sektor sampingan, sehingga belum mampu memberi kontribusi berarti sedangkan sumberdaya telah tersedia melimpah untuk mendukung pengembangannya. Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi perolehan devisa maupun penciptaan kesempatan kerja. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan unsur lokalitas masyarakat yang ada. Sehingga konsep pengembangan pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi, dan bersifat multi sektor.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan

lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Berkembangnya pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi yakni orang-orang kota yang pergi berekreasi ke desa. Luasnya skala pengaruh sektor pariwisata memerlukan strategi yang mantap dalam pengolaannya, seperti penyediaan fasilitas pelayanan dan penanganan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten Jember berpotensi besar untuk menjadi salah satu tempat tujuan wisata, karena Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten pesisir di selatan Jawa Timur. Jember terdiri dari 31 kecamatan, enam diantaranya merupakan kecamatan pesisir. Jumlah desa pesisir yang berada dalam enam kecamatan tersebut adalah 11 desa, salah satunya yakni Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas.

Desa Mayangan memiliki potensi yang berbeda dari kawasan pesisir lain di Kabupaten Jember. Desa mayangan merupakan desa pesisir yang memiliki panorama hutan mangrove yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Potensi yang telah ada tersebut dapat dikelola dan dikembangkan menjadi wisata baru untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan dapat mengurangi pengangguran pada masyarakat itu sendiri. Desa Mayangan memiliki potensi yang jarang di temui di daerah lain, karena Desa Mayangan merupakan satu-satunya Desa yang memiliki potensi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Jember. Potensi tersebut menjadikan faktor pendukung untuk terbangunnya suatu kawasan wisata alam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Masyarakat Desa Mayangan mendukung upaya pembangunan desa untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata karena perekonomian masyarakat desa mayangan masih sangat lemah, sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan karena Desa Mayangan merupakan daerah pesisir.

Hutan mangrove di Desa Mayangan sering dimanfaatkan masyarakat setempat diantaranya memudahkan nelayan untuk menjaring ikan tanpa harus pergi berlayar ke laut, selain itu pemanfaatan hutan mangrove dapat juga dibangun sebuah destinasi wisata alam sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih dari keberadaan hutan mangrove tersebut sehingga keberadaan Sumber Daya Alam tersebut memberikan sebuah upaya bagi masyarakat lokal untuk merencanakan pembangunan destinasi wisata alam yang menyajikan panorama hutan mangrove dan pohon cemara yang terdapat di kawasan pesisir di Desa Mayangan.

Besarnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan Sumber daya alam tersebut untuk dijadikan destinasi wisata sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan masyarakat lokal untuk membuat sebuah perencanaan destinasi wisata mangrove yang nantinya dapat dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat menambah perekonomiannya menjadi lebih baik. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, gagasan/ide yang di kemukakan oleh masyarakat untuk menjadikan sumber daya alam tersebut menjadi destinasi wisata mangrove telah ada sejak dua tahun lalu, akan tetapi belum terealisasikan dalam bentuk apapun. Sehingga pada tahun 2019 pemerintah desa dan masyarakat lokal bermusyawarah kembali untuk memulai suatu perencanaan yang akan di lakukan. Perencanaan secara matang sangat penting untuk dilakukan karena sebagai acuan pelaksanaan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang direncanakan dan juga mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan program untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata mangrove di Desa Mayangan memberikan harapan baru kepada kelompok/masyarakat untuk memulai mewujudkan keinginannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan definisi pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes dalam (Soelaiman, 1998:132):

“Pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi

menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional.”

Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja. Pembangunan masyarakat yang berkesinambungan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya setempat/lokal dan mengutamakan kreatifitas-inisiatif serta partisipasi masyarakat di Desa Mayangan.

Mengajak masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman dan menjaga mangrove tersebut sangatlah tidak mudah, akan tetapi terdapat beberapa kelompok yang peduli akan kesadaran lingkungan dan pariwisata yakni Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang memiliki peran dalam konservasi mangrove di desa mayangan. Kelompok Sadar Wisata yang merupakan organisasi atau lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan berperan sebagai penggerak dalam mengembangkan kepariwisataan dan dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan bagi masyarakat di daerah wisata. Pokdarwis sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan yang tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek atau memegang peran penting terhadap suatu keberhasilan dalam mengembangkan pariwisata.

Pengawasan masyarakat pesisir di Desa Mayangan juga melibatkan POKMASWAS yang di bentuk dengan beranggotakan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan nelayan setempat. Sistem perekrutan belum dilakukan secara

resmi, masyarakat yang bersedia menjadi anggota Pokmaswas mengajukan diri secara sukarela dan tidak mendapatkan gaji dalam menjalankan kegiatan Pokmaswas. Peranan Kelompok Masyarakat Pengawas cukup besar di masyarakat pesisir dan pantai, kontribusi kelompok ini juga dapat dikatakan sangat penting sehingga perlu diadakannya sosialisasi tentang tugas dan fungsi dari Kelompok Masyarakat Pengawas.

Keberadaan Kelompok Masyarakat pengawas dan Kelompok Sadar Wisata sebagai pengelola itu dapat menjaga gangguan keseimbangan ekosistem mangrove di Desa Mayangan, sehingga mendorong munculnya inisiatif untuk melakukan pembentukan kelompok yang bertugas dalam pengamanan kawasan, kegiatan-kegiatan produktif secara berkelompok juga mampu menunjang kehidupan masyarakat, Partisipasi masyarakat lokal juga dapat dilihat dari hal tersebut. Ketika partisipasi masyarakat sekitar terbentuk dengan kesadaran maka perencanaan destinasi wisata mangrove yang ada di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini akan menjadi wisata mangrove yang berbasis masyarakat lokal yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Perencanaan yang berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Desa Mayangan merupakan upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses-proses pembangunan. Terbukanya akses masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu unsur dalam prinsip dari kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kajian yang menjadi titik tekan dalam ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini menjadikan peneliti lebih tertarik pada proses perencanaan pembangunan wisata karena perencanaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk menjadikan daerahnya menjadi desa wisata. Terkait dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah “Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal” di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berawal dari suatu masalah, maka penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai untuk melakukan pemecahan masalahnya. Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan yang akan dilakukan untuk memulai suatu wisata yang berbasis masyarakat lokal sangat tidak mudah dalam penerapannya, maka dari itu pentingnya partisipasi masyarakat juga sangat mempengaruhi suatu perencanaan tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam bagaimana perencanaan destinasi wisata mangrove yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan Pemerintah Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove yang Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan oleh seorang peneliti agar penelitian ini akan dibawa kemana nantinya. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis masyarakat lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pemaparan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Mampu digunakan sebagai referensi tentang perencanaan destinasi wisata berbasis partisipasi masyarakat di daerah-daerah yang memiliki karakter-karakter yang sama dalam mengelola sumber daya lingkungan yang ada.
2. Mampu mengelola aset komunitas dengan adanya perencanaan destinasi wisata mangrove sehingga menjadi aset yang bermanfaat.

3. Mampu memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan agar terwujudnya desa wisata.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan masyarakat yang komprehensif pada hakekatnya membutuhkan suatu perencanaan dan pemahaman mendalam mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dibangun. Pemahaman ini menjadi pijakan didalam upaya menuju keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dari tinjauan ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Rahman, 2011). Setiap upaya pembangunan harus menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti ini, proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan di masa-masa mendatang. Sebab dengan tergarapnya sumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan yang ada, akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya melaksanakan pembangunan di masa mendatang pada cakupan bidang garapan yang semakin luas pula. Sebaliknya, jika potensi sumberdaya lokal tidak tergarap dan menggantungkan dari luar, pada suatu saat pasti akan kehabisan kemampuan untuk mendatangkan sumberdaya tersebut. Dan karena sumberdaya lokal tidak pernah tergarap, tidak akan tumbuh inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksanakan pembangunan lanjutan, sehingga berhentilah pembangunan diwilayah tersebut.

Keberadaan potensi sumber daya alam ketika dikelola dengan baik maka akan berdampak pada kehidupan manusia. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan aktivasi ekonomi yang penting jika dikembangkan dengan baik dapat mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk dalam pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan dapat mememanajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan (Damanik, et al, 2006). Upaya yang akan dilakukan tersebut dengan menggunakan metode intervensi sosial yang menurut pendapat (Adi, 2013:37) merupakan perubahan yang direncanakan terhadap berbagai sasaran perubahan yang terdiri dari individu, keluarga,

kelompok, komunitas dan organisasi. Dengan adanya potensi tersebut masyarakat desa dapat merencanakan suatu pembangunan destinasi wisata mangrove dengan memanfaatkan potensi yang ada di lokasi, pembangunan tersebut tentunya juga akan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

Perencanaan program pembangunan Wisata Mangrove ini disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Perencanaan partisipatif secara umum adalah suatu kegiatan perencanaan yang melibatkan stakeholder untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang tepat. Dalam hubungan ini, perencanaan yang tepat lebih mengacu pada: *untuk* dan *oleh* siapa rencana tersebut disusun, bukan mengacu pada panjang pendeknya rencana, lengkap tidaknya rencana, serta jenis yang direncanakan. Oleh sebab itu, yang perlu mendapat perhatian adalah subyek rencana pembangunan, yakni siapa pelaku utamanya (Santoso, B. 2005).

Dalam perencanaan partisipatif yang dilakukan memiliki faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, menurut (Sunarti, 2003) Faktor tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu potensi yang ada, individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar, faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus des/kelurahan (RT/RW),

tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh kembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, sehubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Slamet dalam (Suryono, 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan masyarakat setempat, maka benar-benar berdsarkan skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap layak dipercaya untuk dapat dilaksanakan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan

pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal.

Menurut Diana Conyers (1954:154) dalam (Suparjan, & Suyatno, H., 2003)., ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya di Negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Berangkat dari paparan diatas, menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya yang akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni* terhadap keberlanjutan program pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Yang mana dengan pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka (Suparjan, & Suyatno, H., 2003).

2.1 Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan menurut pengertian umum adalah suatu upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik (Boserup, E, 2007). Strategi pembangunan berkembang dari masa kemasa secara dinamis sesuai dengan konteks peradapan. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kesenjangan, dan keterbelakangan (Giddens, A. 2013). Paradigma pembangunan kemudian bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai obyek pembangunan, sekarang menjadi subyek pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan local (Cochrane, A., 2010). Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada:

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan;
- b. Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institution* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi;
- c. Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan;
- d. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru;
- e. Lembaga swadaya masyarakat;
- f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praktis pembangunan (Merry, S.E., & Conley, J.M. 2011)

Pembangunan berbasis masyarakat menetapkan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan dan keteringgalan. Untuk mendorong masyarakat berdaya dengan cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi manajemen komunitas menuju kesejahteraan bersama (Seyfang, G., & Haxeltine, A., 2012). Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Pembangunan tanpa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal akan banyak membuang sumberdaya secara sia-sia. Karakteristik geografi seperti lokasi dekat dengan laut, pinggir sungai, pinggir hutan, pedalaman sangat berpengaruh terhadap model pembangunan yang diimplementasikan. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian utama adalah kearifan lokal yang memerlukan inventarisasi, reorientasi, dan reinterpretasi maknanya. Model pemberdayaan yang sering dan mudah dilakukan yaitu dengan menggeneralisasi pemberdayaan masyarakat secara nasional. Pendekatan pemberdayaan secara nasional dilakukan dengan asumsi kebutuhan masyarakat sama untuk seluruh daerah atau sama dengan kebutuhan penyusun kebijakan. Inilah penyebab utama pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (penghamburan sumber daya). Akhirnya dalam beberapa kasus, masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Selain pembangunan yang telah dilaksanakan tidak bermanfaat, generalisasi seperti ini mereduksi kebudayaan lokal yang dapat menjadi modal sosial pembangunan (Storper, M., 2005). Oleh karena itu, pemberdayaan yang disusun secara nasional patut direvaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif-alternatif pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan inovasi. Kedua, dapat membuka akses kepada sumber daya pendukung lainnya. Ketiga, kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat-alat produksi. Terakhir, memperkuat masyarakat untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi

perkembangan mereka (Doppelt, B., 2017). Pembangunan dengan model seperti ini menjadikan masyarakat subyek pembangunan (bukan obyek pembangunan), sehingga masyarakat sudah mempertimbangkan kondisi dan budaya lokalnya masing-masing sebelum menentukan alternatif-alternatif pilihannya.

Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya secara administrasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik, akan tetapi yang lebih substantif yaitu apakah kegiatan tersebut dapat bertahan lama setelah selesai proyek (kebayakan selesai proyek selesai pula kegiatan). Kegiatan dapat bertahan lama apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Tugas pemerintah dan lembaga adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian (Nam, T., & Pardo, T. A., 2011) dalam M. Rahman Taufiq. Pemberdayaan dikatakan sangat berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

2.2 Konsep Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Menurut (Deepa Naryan, 1995) Partisipasi juga memiliki pengertian:

“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”

Artinya, Suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan). mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka. Sedangkan Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang/masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program

pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi: a) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan; b) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat; c) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna; d) Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental; e) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*); f) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. (Adi, 2007)

2.3 Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan desa merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan Nasional, Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional, Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Perencanaan yang dikemukakan oleh (Hall dalam Page dan Connel, 2006) adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengantisipasi, mengatur, dan memonitoring perubahan agar dapat berkontribusi secara lebih luas terhadap keberlanjutan destinasi, sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan terhadap destinasi atau tempat tersebut. Dengan begitu perencanaan yang akan dilakukan di lokasi penelitian ini adalah perencanaan yang memang telah di monitoring sebelumnya untuk perubahan yang akan terjadi sehingga masyarakat juga akan merasakan dampak dari adanya wisata baru di kawasan hutan mangrove di lokasi penelitian.

2.3.1 Perencanaan Partisipatoris

Model perencanaan partisipatoris dalam Isbandi (2007:127) dilakukan bersama komunitas sasaran yang memiliki pengertian “dilakukan bersama komunitas sasaran” yang dapat bermakna:

1. Proses Assesment dilakukan bersama masyarakat, sedangkan proses pembuatan rencana pada awalnya dibuat oleh tim perencana terlebih dahulu kemudian baru disampaikan pada masyarakat dalam suatu pertemuan khusus dimana masyarakat diajak untuk memberikan masukan terhadap tawaran rancangan program aksi yang dilakukan dalam proses pertemuan dengan masyarakat ini tim perencana baik secara langsung maupun tidak langsung juga memberikan *community education*. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proses pembelajaran masyarakat akan dapat terwujud. Setelah itu tim perencana menyempurnakan rancangan program aksi berdasarkan masukan dari masyarakat, dan menyerahkan ringkasan program aksi yang akan dilakukan pada wakil-wakil komunitas sasaran untuk disampaikan secara berantai keseluruh komunitas sasaran diwilayah kerja tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa perencanaan yang melibatkan masyarakat, akan tetapi tidak sepenuhnya dilakukan bersama masyarakat. Karena masyarakat masih belum terbiasa akan adanya pola partisipasi seperti yang dilakukan untuk merencanakan destinasi wisata mangrove. Masyarakat hanya memberikan gagasan/ide untuk memberikan masukan kepada tim perencana. Sehingga perencanaan ini akan berhasil untuk kedepannya.

2. Sedangkan pengertian perencanaan yang dilakukan bersama masyarakat yang kedua adalah masyarakat dilibatkan pada seluruh tahap perencanaan (baik itu assesment, perencanaan program aksi, termasuk pengembangan kriteria pencapaian) masyarakat dilibatkan secara aktif. Hal ini dapat dilakukan bila komunitas sasaran sudah mulai terbiasa dengan pola partisipatif seperti ini, serta mereka mempunyai kematangan dalam proses berfikir dan mau terlibat dalam berbagai tahapan perencanaan tersebut.

Dilihat dari dua kondisi diatas, maka perencanaan bersama masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dari tahap assesment sehingga perumusan masalah aksi baru dapat dilakukan kalau masyarakat telah berkembang. Sedangkan pada tahap awal peralihan dari pendekatan direktif (instruktif) ke pendekatan non-direktif (partisipatif), proses perencanaan yang partisipatif masih dalam kondisi melibatkan masyarakat pada sebagian dari keseluruhan proses perencanaan yang ada. Disinilah perbedaan antara kedua hal diatas (Isbandi. Adi, 2007).

Dalam kaitan dengan upaya melakukan perencanaan partisipatoris ditingkat komunitas yang tidak hanya sekedar mangandalkan pada data sekunder dan kepentingan organisasi, maka dibawah ini disajikan salah satu alternatif model perencanaan yang menfokuskan pada proses pemberdayaan, baik pada masyarakat jug pada tim perencana yang terlibat. Model ini disebut dengan nama Model Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas. Terdapat beberapa langkah proses perencanaan partisipatoris yang berbasis masyarakat didalam (isbandi, Adi. 2007), yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji kualitas hidup komunitas saat ini.
- b. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor manusia dan sosial yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat saat ini.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor non manusia yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat saat ini.
- d. Mengidentifikasi faktor regulasi, kebijakan dan program yang terkait dengan timbulnya masalah pada faktor manusia dan modal sosial, juga pada faktor non-manusia.
- e. Mengembangkan rencana program aksi, termasuk menentukan objektif dan kriteria pencapaian dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Serta mengembangkan rencana anggaran untuk membiayai program aksi yang telah direncanakan.

Kegiatan a hingga d diatas adalah kegiatan yang terkait dengan proses assesment masalah dan potensi yang ada di masyarakat, sedangkan bagian e adalah bagian yang terkait dengan perencanaan program aksi dan perencanaan

evaluasi (termasuk didalamnya merumuskan kriteria pencapaian ataupun objektif program), yang kemudian diakhiri dengan membuat rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan rencana program aksi. (Isbandi, Adi. 2007).

Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta maka masyarakat cenderung akan menjadi dependent (tergantungan) pada agen perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka ketergantungan masyarakat pada agen akan semakin meningkat.

Tahapan perencanaan partisipatif dalam (Santoso, Budhy. 2005) terdapat beberapa tahapan, yakni:

- a. *Komitmen Pelaku*, kurangnya komitmen akan mempengaruhi jalannya partisipasi, sehingga diperlukan usaha untuk memahami peran masing-masing pelaku pembangunan.
- b. *Identifikasi dan analisa pelaku*, diperlukan suatu upaya untuk mengidentifikasikan para pelaku yang akan terlibat dalam proses partisipasi. Sebaiknya pengidentifikasian para pelaku dari kalangan non-pemerintah tidak dilakukan oleh pemerintah. Mekanisme dan proses pengidentifikasian tersebut, sepenuhnya diserahkan kepada organisasi non-pemerintah. Selain mengidentifikasi pelaku (lembaga), juga mengidentifikasi aktifitas para pelaku tersebut selama ini, serta keinginan, harapan maupun kebutuhan mereka terhadap proses partisipasi.
- c. *Identifikasi kondisi partisipasi*, yang telah berjalan meliputi lingkup partisipasi (isu-isu pembangunan yang telah melibatkan para pelaku),

cangkupan partisipasi (keragaman dari para pelaku yang terlibat), tingkat partisipasi (bentuk, fungsi mekanismenya), kualitas partisipasi (kedalaman serta hasil dari proses yang dijalankan terutama menyangkut hubungannya dengan kebijakan yang dihasilkan). Identifikasi ini, dapat dilakukan bersama antara pelaku pemerintah dan non-pemerintah.

- d. *Identifikasi kapasitas pelaku*, berguna untuk memahami kondisi dan permasalahan yang ada serta merencanakan pengembangan kapasitas selagi proses partisipasi dijalankan. Meliputi; kapasitas individual/lembaga; sumber bendanaan; kemampuan para pelaku untuk melakukan dialog yang konstruktif. Untuk pelaku pemerintah, kapasitas yang perlu diidentifikasi adalah dalam mengorganisasikan serta mengelola proses partisipasi, termasuk dalam bernegosiasi dengan pelaku lainnya. Dan untuk pelaku non-pemerintah kapasitas dalam menganalisa berbagai informasi yang tersedia, mempresentasikan dan mendiskusikan berbagai pandangan yang strategis, dan memahami proses birokrasi yang perlu untuk dilakukan.
- e. *Menentukan prioritas*, bermanfaat dalam menyusun rencana kerja dari proses partisipasi yang akan dilakukan. Keterbatasan dana, sumberdaya manusia, waktu, data, pemahaman, kelembagaan, dan lainnya merupakan alasan kenapa prioritas perlu dilakukan.
- f. *Memformulasikan rencana kerja*. Sebagai alat rujukan bersama antar pelaku untuk melakukan proses kerjasama. Rencana kerja meliputi: tujuan dan proses partisipasi, pembagian kewenangan antar masing-masing pelaku, pelaku-pelaku yang harus terlibat beserta peranannya, metode partisipasi yang akan dilakukan, pengembangan kapasitas masing-masing pelaku dalam proses partisipasi, indikator-indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan, serta implikasi pendanaan dari proses tersebut.
- g. *Melembagakan partisipasi*. Sebagai jaminan untuk keberlanjutan. Yaitu bukan membentuk lembaga yang berfungsi menjalankan proses partisipasi, tetapi suatu landasan hukum (regulasi) yang disepakati bersama dan disahkan dalam jaminan bahasan, mekanisme, proses dan fungsi dari

partisipasi untuk priode-priode selanjutnya. Prosedurnya adalah: membentuk tim penyusun regulasi; menjaring isu strategis; menulis naskah akademik; menulis ketentuan/aturan pasal demi pasal; melakukan konsultasi dan penyepakatan ke berbagai pelaku pembangunan (stakeholder), yaitu: pemerintah, masyarakat, swasta; mengesahkan; mempublikasikan secara luas.

- h. *Memantau dan mengevaluasi partisipasi*, diperlukan sebagai upaya untuk memantau atau mengawal proses partisipasi dari mengembangkan komitmen masing-masing pelaku sampai dengan mekanisme kerjasama antar pelaku yang dilakukan. Hasil dari pemantauan ataupun evaluasi harus mampu memberikan masukan kepada perbaikan proses partisipasi pada tahun selanjutnya.

Dalam (Isbandi, A. 2007) Beberapa negara tidak mau menyatakan secara terbuka mengenai perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, hal ini terlihat dalam istilah populer seperti “*bottom-up planning*” (perencanaan dari bawah), keterlibatan pada “*grass roots*” (sampai pada masyarakat yang paling bawah), “*democratic planning*” (perencanaan demokratis) dan “*participatory planning*” (perencanaan partisipatif). Dalam suatu alasan mengenai perencanaan demokratis di Asia Selatan Myrdal menyatakan bahwa:

“Bahkan penguasa elit di Negara-negara Asia Selatan yang sudah berkecenderungan ke bentuk regim otoriter tetap menyadari bahwa hanya kecil sekali harapan adanya perencanaan yang efektif dalam pembangunan bila tanpa dukungan masyarakat (populer) ... menemukan jawaban mengenai keterlibatan masyarakat adalah merupakan suatu dalil bagi perencanaan demokratis (Myrdal, 1968:851)”

Pernyataan diatas didukung oleh fakta bahwa di Cina sekalipun slogan yang paling populer adalah “Perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas”. Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Satu-satunya cara agar berbagai informasi dapat diperoleh hanyalah dengan jalan melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam proses perencanaan.

Alasan Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Isbandi, A. 2007).

Perencanaan tingkat lokal akan menjadi lebih efektif bila ada proses desentralisasi implementasi rencana tersebut. Bila suatu rencana hanya dipersiapkan di tingkat lokal dan kemudian diajukan ke tingkat nasional dan rencana tersebut kemudian di satukan sebagai bagian rencana nasional serta diimplementasikan lewat kementerian atau dirjen suatu departemen, maka semua saja yang terlibat dalam proses perencanaan di tingkat lokal tidak akan mungkin memiliki suatu perasaan bahwa mereka sebenarnya mempunyai peran keterlibatan sedemikian besar dan murni serta mungkin mempunyai komitmen yang sama terhadap perencanaan itu sendiri. Kenyataannya mereka akan menganggap proses persiapan perencanaan sebagai suatu yang tak berujung pangkal, sedangkan waktu yang telah tersita guna melaksanakan persiapan perencanaan tersebut tidak lebih dari sekedar memenuhi tuntutan pemerintah pusat. (Isbandi, A. 2007)

Walau demikian, bila masyarakat setempat benar-benar terlibat dalam implementasi perencanaan, khususnya jika memiliki semacam kontrol langsung terhadap lokasi keuangan dan sumber daya lainnya yang ada; kemungkinan besar mereka akan lebih merasa memiliki dan mempunyai relevansi yang kuat serata merasa terpakai. Beberapa Negara tertentu telah menyadari akan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan yang didesentralisir sebagai suatu alat guna mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan mutu pelaksanaan perencanaan itu sendiri, bahkan beberapa diantaranya (misalnya: Tanzania, Zambia, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon) akhir-akhir ini telah melaksanakan pengelolaan program-program secara desentralisasi yang sejauh ini dapat dilakukan (Conyers: 1981a).

2.3.2 Perencanaan Sosial

Di dalam konteks pengembangan masyarakat ada perencanaan sosial yang seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pemaksaan dari atas mengenai rencana besar atau bentuk aktivitas yang sangat teknis dinyatakan secara tidak langsung dalam model (Rothman, 1974) dalam tipologi praktik organisasi masyarakat. Menurut (Robert Moris & Robert H. Binstock, 1996), perencanaan adalah suatu metode yang relatif dan sistematis dalam memecahkan masalah. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Bertujuan untuk mengatasi kemungkinan adanya hambatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif maka kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Pokok perhatian dalam Perencanaan Sosial adalah melakukan modifikasi, menghilangkan atau membuat kebijakan-kebijakan ataupun program-program sosial dalam suatu organisasi pelayanan.

Perencana sosial profesional umumnya mempunyai peran utama yaitu,

1. Mengembangkan perundang-undangan.
2. Mengevaluasi program-program sosial.
3. Menciptakan/ mendisain model-model pelayanan.
4. Mengembangkan komite dewan penasehat/ badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan.

Artinya, Perencanaan sosial adalah suatu fungsi yang terorganisir merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Perencanaan sosial juga sebagai perencanaan pada sektor-sektor sosial, seperti sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepedudukan dan keluarga berencana. Selain itu, perencanaan sosial

sebagai perencanaan lintas sektoral. Pengertian ini sifatnya lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari perencanaan ekonomi. Sebagai perencanaan pada aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi. Sehingga didalam perencanaan yang dilakukan ini merupakan perencanaan sosial yang juga menyangkut kebutuhan masyarakat untuk kedepannya.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak faktor dan dimensi waktu. Perencanaan, terutama yang menyangkut kepentingan publik bukan merupakan kegiatan yang mempertimbangkan hanya satu aspek saja, seperti aspek sosial atau ekonomi atau politik atau lainnya. Melainkan harus mengintegrasikan semua aspek dalam masyarakat. Perencanaan juga mempertimbangkan masa lalu dan masa kini untuk menentukan masa depan yang diinginkan. Hal tersebut ditegaskan oleh (Roes dalam Gun dan Var, 2002).

Sehubungan dengan dimensi waktu yang disebutkan, perencanaan bercermin pada masa lalu serta mempertimbangkan masa kini untuk menentukan dan mencapai target masa mendatang. Oleh karena itu dalam perencanaan harus terdapat arah dan langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai target yang telah ditentukan (McCabe dalam Mason, 2003). Perencanaan juga dilihat sebagai sebuah proses yang terdiri dari berbagai elemen. Salah satu elemen dalam proses perencanaan adalah pengambilan keputusan. Veal (1994:3) menyatakan bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai proses pengambilan keputusan. (Hall, 2000a) menawarkan pemikirannya bahwa keputusan-keputusan ini saling bergantung satu sama lain serta terikat secara sistematis. Proses perencanaan menyangkut *'bargaining, negotiation, compromise, coercion, values, choice and politics'* (Hall dalam Mason, 2003).

Pemikiran lain ditawarkan oleh Chadwick dalam (Mason 2003) yang menyebut bahwa:

"planning is a process of human thought and action based upon that thought – in point of fact forethought, thought for the future, nothing more or less than this in planning".

Artinya, perencanaan adalah proses pemikiran dan tindakan manusia berdasarkan fakta pemikiran untuk masa depan, pemikiran tersebut tidak lebih maupun kurang dari dalam perencanaan itu sendiri. Seperti perencanaan dalam

konteks umum, perencanaan dalam konteks kepariwisataan juga tidak terlepas dari kepentingan publik. Hal ini dikarenakan sifat kepariwisataan sebagai suatu industri yang melibatkan banyak pihak terkait dari banyak sektor. Dengan keterlibatan banyak pihak dan banyak sektor, perencanaan kepariwisataan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang di yakini oleh para pihak terkait dari berbagai sektor. Harley dalam (Mason, 2003) mengindikasikan bahwa kebijakan publik dan perencanaan merupakan '*social process through which ways of thinking, ways of valuing and ways of acting are actively constructed by participants*'. Pemikiran itu juga didukung oleh (Gunn, 1998) dan (Veal, 1994) yang menyatakan bahwa perencanaan untuk rekreasi dan kepariwisataan sangat bergantung pada nilai-nilai (*values*), dan masing-masing berargumentasi bahwa nilai-nilai komunitas (*community values*) betul-betul penting. Oleh karena itu, kebijakan rekreasi dan/atau kepariwisataan harus mencerminkan nilai-nilai pihak terkait.

Menurut (Gilbert dan Specht, 1977) dalam Edi Suharto untuk memahami prinsip-prinsip dalam perencanaan sosial dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model perencanaan sosial. Sedikitnya ada empat model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri yakni:

a. Model Rasional Komprehensif

Model perencanaan ini merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan atas fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam model ini masalah yang ditemukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik.

Namun demikian, beberapa ahli menunjukkan beberapa kelemahan yang melekat pada model ini (winarno: 2002):

1. Karena masalah dan alternatif yang diusulkan oleh model ini bersifat komprehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan seringkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan kongkrit.
2. Teori rasional komprehensif seringkali tidak realistis karena informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan alternatif-alternatif yang diajukan seringkali menghadapi hambatan, misalnya dalam hal waktu dan biaya.
3. Para pembuat keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.

b. Model Inkremental

Kekurangan yang ada pada model rasional komprehensif melahirkan model inkremental atau model penambahan (*incremental*). Prinsip utama dalam model ini mensyaratkan bahwa perubahan –perubahan yang diharapkan dan perencanaan yang tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau hanya pada penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan pilihan terhadap kebijakan yang berbeda secara marginal saja. Misalnya ada dua kebijakan A dan B yang sama-sama akan menghasilkan a,b dan c dalam ukuran yang sama. Namun demikian A dapat menghasilkan d yang lebih besar atau lebih banyak dari pada B. Sedangkan B menghasilkan e yang lebih besar dari pada A. Maka untuk memilih kebijakan A atau B caranya adalah dengan membandingkan perbedaan antara d dan e saja, serta menentukan yang mana yang harus dikorbankan. (Suharto,2005:74)

c. Model Pengamatan Terpadu

Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (*mixedscanning model*) dikembangkan oleh Amitai Etzioni melalui karyanya *Mixed Scanning: A Thord Approach to Decision Making* yang dimuat dalam jurnal *Administration*

Review, XXVII pada Desember 1967. Model ini merupakan jalan tengah dari model pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan diatas, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Tetapi tidak dengan pendekatan rasional, hal-hal yang detail dan spesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Sementara ini, keputusan –keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat didalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsur dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada unsur lainnya. (Suharto,2005:74)

d. Model Transaksi

Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program. Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus diantara mereka yang terlibat. (Suharto,2005:74)

Dalam penelitian ini peneliti menemukan model perencanaan yang memiliki keterkaitan antara apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan teori model perencanaan. Teori perencanaan model rasional komprehensif ini adalah model yang menekankan adanya aspek-aspek yang didasarkan atas fakta-fakta, teori atau nilai tertentu yang terdapat dalam lokasi penelitian, sehingga penelitian ini menjadi bentuk yang relevan. Dalam model perencanaan rasional komprehensif ini terdapat masalah yang harus didiagnosis, masalah yang terdapat dalam lokasi penelitian ini adalah bagaimana cara memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada desa menjadi peluang bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut. Sehingga memiliki nilai jual untuk mempromosikan wisata yang ada di lokasi tersebut.

2.3.3 Perencanaan Program Pariwisata

Perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan perencanaan program Martinez (Mardikanto, 1993) mengungkapkan bahwa perencanaan program merupakan upaya perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan program-program. Perencanaan program merupakan suatu proses yang berkelanjutan, melalui semua warga masyarakat, penyuluh dan para ilmuwan memusatkan pengetahuan dan keputusan-keputusan dalam upaya mencapai pembangunan yang mantap.

Sehubungan dengan pengertian perencanaan program ini, Lawrence (Mardikanto, 1993) menyatakan bahwa perencanaan program pemberdayaan masyarakat menyangkut perumusan tentang: (a) proses perencanaan program, (b) penulisan perencanaan program, (c) rencana kegiatan, (d) rencana pelaksanaan program (kegiatan), dan (e) rencana evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut. Dari beberapa definisi dan pengertian tentang perencanaan program tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perencanaan program merupakan proses berkesinambungan tentang pengambilan keputusan menyangkut situasi, pentingnya masalah atau kebutuhan, perumusan tujuan, dan upaya pemecahan yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Keputusan yang diambil pada perencanaan program harus mengandung pengetahuan yang tepat di masa yang akan datang. Hal inilah yang membedakan perencanaan dengan peramalan. Perencanaan harus dapat mengukur hasil-hasil yang dicapai berdasarkan pengetahuan yang tepat tentang kondisi masyarakat. Oleh karenanya beberapa pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat: (1) merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Rangkaian pengambilan keputusan dalam perencanaan program tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki, tercapainya tujuan dalam perencanaan program yang akan dilakukan di lokasi penelitian ini merupakan suatu rencana yang harus berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan

dampak baik dengan adanya wisata mangrove yang akan dibangun; (2) proses pengambilan keputusan tersebut berdasarkan fakta dan sumber daya yang ada, sumber daya yang ada pada lokasi penelitian yang memiliki hutan mangrove di pesisir pantai selatan sehingga masyarakat dan pemeritah desa menginginkan sumber daya tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa; (3) dirumuskan secara bersama oleh penyuluh dengan masyarakat sasarnya, dengan didukung oleh para spesialis, praktisi dan penentu kebijaksanaan, dalam perencanaan ini terdapat beberapa pihak yang ikut andil dalam menentukan rencana apa saja yang akan di terapkan dalam pembangunan wisata mangrove, sehingga masyarakat pun juga ikut merasakan adanya potensi sumber daya yang harus mereka jaga dan masyarakat akan merasa memiliki kawasan tersebut; (4) meliputi perumusan tentang; keadaan, masalah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan, yang dinyatakan secara tertulis, perencanaan program ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya yang ada sehingga permasalahan perekonomian masyarakat desa dapat teratasi dengan adanya destinasi wisata mangrove di desa mereka; (5) harus mencerminkan perubahan ke arah kemajuan, perubahan yang akan terjadi pada masyarakat di desa akan sangat jelas terlihat. Banyaknya peluang yang akan di dapat oleh masyarakat seperti contohnya dalam hal perekonomian, masyarakat dapat membuka warung dan menawarkan jasa perahu serta parkir untuk wisata mangrove.

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. menurut Inskeep (1991:29) Terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

- a. *Continous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitori feed back yang ada.

- b. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem.
- c. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
- d. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
- e. *Environmental and Sustainable Development Approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemeni dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
- f. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
- g. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan dengan teknik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.
- h. *Application of Systematic Planning Approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dan aktivitas.

Keberhasilan atau *goals* biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal, dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara *objectives* adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual. *Objectives* bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai goal-goal pembangunan.

Terkait dengan perencanaan program pariwisata yang ada di lokasi penelitian ini berkaitan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh (Peter Murphy, 1991) yang memiliki pendekatan *Community Approach*, pendekatan ini menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi. Sehingga perencanaan program pariwisata ini akan dinilai sebagai partisipasi berbasis masyarakat.

2.4 Konsep Ekowisata Mangrove

Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata. Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibandingkan dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah ecotourism. Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya pada masyarakat setempat. Atas dasar pengertian, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Eco-traveler ini pada hakekatnya konservasionis (Fandeli, 2000).

Ekowisata diperkenalkan pertama kali oleh Ceballos-Lascurain (Higham, 1997) yang mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai kunjungan ke daerah-daerah yang masih bersifat alami yang relatif masih belum terganggu dan terpolusi dengan tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi dan menikmati pemandangan alam dengan tumbuhan liar serta budaya (baik masa lalu maupun sekarang) yang ada di tempat tersebut.

Berbeda dengan wisata konvensional Menurut Yoeti (1996) ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Dari definisi ini ekowisata dipandang dari tiga perspektif yaitu:

- a. Ekowisata sebagai produk yang merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam
- b. Ekowisata sebagai pasar yang merupakan perjalanan yang di arahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yang merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Disini kegiatan wisata bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekan dan merupakan ciri khas ekowisata.

Menurut (Dahuri, 1996), alternative pemanfaatan ekosistem mangrove yang paling memungkinkan tanpa merusak ekosistem ini meliputi: penelitian ilmiah (*scientific research*), pendidikan (*education*), dan rekreasi terbatas/ ekoturisme (*limited recreation/ecotourism*). Menurut (Muhaerin, 2008), sifat dan karakteristik dari ekowisatawan adalah mempunyai rasa tanggung jawab sosial terhadap daerah wisata yang dikunjunginya. Kunjungan yang terjadi dalam satu satuan tertentu yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada sebuah kunjungan dan wisata saja. Wisatawan ekowisata biasanya lebih menyukai perjalanan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Daerah yang padat penduduknya atau alternatif lingkungan yang serba buatan dan prasarana lengkap akan kurang di sukai karena dianggap merusak daya tarik alami.

Menurut Mariotti ekowisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik sehingga wisatawan berminat mengunjungi tempat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) potensi alam, yang dimaksud dengan potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah bentang alam misalnya pantai, hutan dll (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke daya tarik wisata tersebut. (2) potensi kebudayaan, yang dimaksud dengan potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument, dan lain sebagainya. (3) Potensi Manusia, manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah. Potensi manusia juga dapat menjadi sumber daya yang akan diturut sertakan dalam pengolahan pariwisata.

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang membedakannya dengan wisata lain. Dalam prakteknya hal ini terlihat dalam bentuk kegiatan wisata, seperti:

- a. Secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya
- b. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan wisata serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka.
- c. Dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil (Higham, 1997).

Artinya, ekowisata adalah wisata berbasis alam yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri.

Mangrove merupakan pohon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (*intertidal trees*), ditemukan di sepanjang pantai tropis di seluruh dunia. Pohon mangrove memiliki adaptasi fisiologis secara khusus untuk menyesuaikan diri dengan garam yang ada di dalam jaringannya. Mangrove juga memiliki adaptasi melalui sistem peakaran untuk menyongkong dirinya ke sedimen lumpur yang halus dan mentransportasikan oksigen dari atmosfer ke akar. Sebagian besar mangrove memiliki benih terapung yang diproduksi setiap tahun dalam jumlah besar dan terapung hingga berpindah ke tempat baru untuk berkelompok (Kusumana, 1997). Hutan mangrove seringkali disebut dengan hutan bakau. Akan tetapi sebenarnya istilah bakau hanya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhan penyusun hutan mangrove, yaitu *rhizophora spp.* Oleh karena itu, istilah hutan mangrove sudah ditetapkan sebagai nama baku untuk *mangrove forest*. (Danhuri, 1996)

Ekosistem mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Ekosistem mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindungi (Bengen, 2001 dalam Muhaerin 2008).

Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata (ekowisata) sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari *old tourism* yaitu wisatawan yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi *new tourism* yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang didalamnya ada unsur pendidikan dan konservasi (Rutana, 2011). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mengelola dan mencari daerah tujuan ekowisata yang spesifik alami dan kaya akan keanekaragaman hayati serta dapat melestarikan lingkungan hidup.

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah–daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001).

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau permukiman pesisir memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber perekonomian dari wilayah laut (Prianto, 2005). Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Lewaherilla, 2002). Masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mereka yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Secara khusus masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah para nelayan tradisional yang oleh karena ketidakberdayaannya dalam segala aspek, baik materi, pengetahuan, maupun teknologi, menjadikan mereka miskin dan tertinggal.

Dalam perencanaan yang dilakukan adalah bentuk keinginan masyarakat untuk menjadikan daerahnya menjadi tempat destinasi wisata yang menjual nilai dari hutan mangrove itu sendiri, sehingga inisiator kawasan mangrove tersebut juga melakukan konservasi dan pendidikan bagi masyarakat yang ingin belajar mengenai penanaman tanaman mangrove, sehingga tepat tersebut merupakan tempat yang memiliki unsur pendidikan.

2.5 Konsep Desa Wisata

Desa wisata dapat di pahami dengan pengertian bahwa di desa itu dapat terjadi kegiatan pariwisata karena adanya daya tarik kehidupan desa dengan karakteristik yang terdapat di dalamnya, termasuk masyarakat yang ada di desa itu. Daya tarik obyek, akses dan amenities menjadi yang melingkupi. Potensi daya tarik budaya, potensi daya tarik alam dengan karakteristiknya masing-masing akan memiliki peluang dengan apa orang diundang sebagai wisatawan guna menikmati daya tarik itu dalam upaya untuk memperoleh pengalaman dan kenangan yang menyenangkan, mengesankan bagi wisatawan.

Apabila suatu desa telah mencanangkan diri untuk menjadikan desa itu sebagai “desa wisata” maka tindakan pengembangannya akan meliputi: menemukan dan mengenali potensi yang akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, aspek perekonomian, demikian pula aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pihak yang akan mengelola produk-produk yang dikembangkan secara tepat dan bermanfaat. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan, kesediaan, atau kesanggupan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang akan diselenggarakan di desa dimana masyarakat itu tinggal.

Dalam upaya pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, pemahaman mengenai wisata berwawasan lingkungan sangatlah mutlak diperlukan. Hal ini lebih diarahkan untuk memenuhi kriteria pengelolaan desa wisata, yaitu: tidak meninggalkan aspek otentisitas, orisinalitas, dan karakteristik daya tarik yang dimiliki. Pengelolaannya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung demi keberlangsungan lingkungan, untuk itulah pengelolaan desa wisata dengan

kemasan produk-produk wisatanya harus berwawasan lingkungan. Wisata berwawasan lingkungan secara sederhana bisa diartikan sebagai perjalanan ke suatu kawasan alam yang relatif masih asli dan tidak tercemar dengan minat untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan alam, flora/fauna dan manifestasi budaya setempat. Kegiatan wisata berwawasan lingkungan bisa dilakukan secara perorangan (*free individual traveler*) atau kelompok (*group inclusive tour*). Apabila dilihat dari segi daya tarik wisata yaitu: a) Berhubungandengan alam (*nature related attraction*); b) Daya tarik wisata didasarkan atas alam (*nature based tourist attraction*).

Tidak hanya dilihat dari segi daya tariknya saja, dibawah ini adalah beberapa hal mengenai kegiatan wisata berwawasan lingkungan: a) Kegiatan wisata berwawasan lingkungan adalah pariwisata berkelanjutan; b) Kegiatan wisata konvensional hendaknya diupayakan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang memadai; c) Keberhasilan harus memberi manfaat ekonomi, sosial, budaya masyarakat lokal agar mereka mempunyai “greget” karena tergugah untuk melindungi sumber-sumber alam, budaya dalam upaya mengkreasi daya tarik/atraksi yang dapat dikemas menjadi produk wisata; d) Wisata tidak hanya belajar tentang destinasi tetapi juga belajar bagaimana membantu keberlangsungan karakteristik destinasi sembari melakukan pendalaman pengalaman; e) Pariwisata berkelanjutan dapat memberi kesadaran kepada semua pihak termasuk wisatawan untuk meminimalisir polusi, menghemat energi, air, listrik dan memberi respek pada budaya dan tradisi lokal; f) Keberhasilan pariwisata tidak ditentukan oleh jumlah pengunjung saja tetapi juga oleh lama tinggal, ekpenditure, kualitas pengalaman.

Beberapa batasan mengenai wisata berwawasan lingkungan yang telah diungkapkan oleh Low Choy (1998:180) mengemuka bahwa wisata berwawasan lingkungan itu memiliki lima prinsip utama, yaitu:

- a. Lingkungan; bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar dan terganggu.
- b. Masyarakat; dapat memberi manfaat pada lingkungan sosial, ekonomi, budaya langsung kepada masyarakat/tuan rumah.

- c. Pendidikan dan Pengalaman; dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya terkait, ada pengalaman dan kesan yang menyenangkan.
- d. Berkelanjutan; dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan lingkungan tempat kegiatan, tidak merusak dan tidak menurunkan mutu baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- e. Manajemen; dikelola agar dapat menjamin daya hidup jangka panjang terkait di daerah tempat kegiatan, menerapkan cara mengelola yang terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup ekonominya. Dengan demikian prinsip tersebut dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana desa wisata berwawasan lingkungan memberikan pengaruh baik pada siapa saja yang menerapkannya.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui informasi tambahan maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding hasil penelitian dengan lokasi yang berbeda karena meskipun obyek penelitiannya sama tetapi hasil penelitiannya akan berbeda. Meskipun terdapat perbedaan baik itu lokasi, waktu, tujuan dan juga obyek peneliti, akan tetapi dengan adanya kajian peneliti terdahulu dapat menjadi rujukan tambahan untuk menganalisis fenomena yang ada secara mendalam. Penelitian terdahulu banyak memberi masukan yang memiliki keterkaitan erat dengan Perencanaan wisata mangrove berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Tinjauan penelitian terdahulu dimaksudkan acuan berfikir dalam penelitian yang dilakukan. Guna mendapatkan informasi-informasi yang mendukung dalam penelitian, maka peneliti harus menelaah kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ryando Permana Putra dan Dra. Wan Asrida, M.Si (2008-2011) dengan judul **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata di Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kapar**. Penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan obyek wisata yang berada di Buluh Cina. Dari hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan yang dapat diambil yakni peran pemerintah desa mencakup tiga hal penting diantaranya yaitu: rencana

pengembangan, pembangunan sarana dan prasarana dan sistem promosi. Rencana pengembangan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat desa Buluh Cina itu sendiri, artinya merekalah yang membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni penelitian terfokus pada rencana pengembangan wisata yang telah ada sedangkan fokus penelitian peneliti adalah tentang bagaimana perencanaan destinasi wisata yang akan dilakukan dan masih berupa potensi atau Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya telah ada akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal didalam wisatanya. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga potensi tersebut dapat bermanfaat pada masyarakat sekitar terutama dampak pada perekonomian masyarakat.

Berikut adalah penelitian yang dibuat oleh Ahmad Zainul Arifin (2017) yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Bintang Kabupaten Bintang**. Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan kawasan wisata di Desa wisata pada kampung bintang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wisata desa wisata pada kampung bintang berkapur desa bintang buyu kecamatan teluk bintang kabupaten bintang belum berjalan optimal hal ini dijelaskan sebagai berikut: sosialisasi belum berjalan dengan baik, kemudian kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta juga masyarakat dalam mengadakan event atau kegiatan yang memperkenalkan langsung kampung bintang bekapur kepada wisatawan. Kemudian pengetahuan diketahui bahwa sumber daya manusia di dinas pariwisata masih kurang memadai baik jumlah pegawai khusus pariwisata dan berdampak pada pengetahuan masyarakat yang tidak dapat tersalurkan dengan baik. Jumlah dan kualifikasi pendidikan pariwisata sangat minim sehingga kendala pengembangan sumber daya pariwisata juga ikut terhambat. Tidak hanya itu

dalam pelaksanaannya dinas pariwisata sudah mengawai kegiatan pariwisata dan di kampung bintang ini pemerintah juga memberikan fasilitas sarana prasarana, serta penyuluhan kepada masyarakat setempat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada peran pemerintah Daerahnya yang mefokuskan pada Sumberdaya Manusianya yang kurang dalam mensosialisasikan pariwisata di Kampung Bintang Berkapur. Sedangkan Penelitian Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove yang terdapat di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten jember ini memfokuskan pada bagaimana Perencanaan yang akan dilakukan oleh Masyarakat serta Pemerintah Desa. Persamaan dalam Penelitian ini adalah membahas tentang Desa Wisata yang perlu dipromosikan lebih untuk peningkatan masyarakat sekitar.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurniawan, Djamhur Hamid, Luchman Hakim (2018) **Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu**. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan di Desa Wisata Tulungrejo. Kawasan Desa Wisata Tulungrejo merupakan salah satu Desa Wisata yang dapat di andalkan di Kota Batu-Malang Jawa Timur. Dibalik kesuksesan Desa Wisata Tulungrejo terdapat permasalahan di Desa Wisata Tulungrejo terkait dengan aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Dari permasalahan tersebut maka harus ditemukan jalan keluar yaitu strategi khusus dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata yang terkait dengan desa wisata dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan fokus yaitu, Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu membahas tentang strategi yang akan digunakan untuk perencanaan dan pengembangan wisata yang telah ada di Desa Tulungrejo. Sedangkan dalam penelitian Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove yang ada di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini memfokuskan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam membangun wisata baru. Persamaan dalam kedua

penelitian ini adalah Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan Desa Wisata di daerahnya.

Berdasarkan ketiga penelitian yang ada diatas dua diantaranya berbicara tentang peran pemerintah desa dan yang satu penelitian lagi berbicara tentang masyarakat. Padahal ketika berbica tentang otonomi desa kedua unsur tersebut adalah hal penting yang dapat di gabungkan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini ingin menggabungkan bagaimana tujuan pemerintah desa dalam daerah otonomi menjalankan perannya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

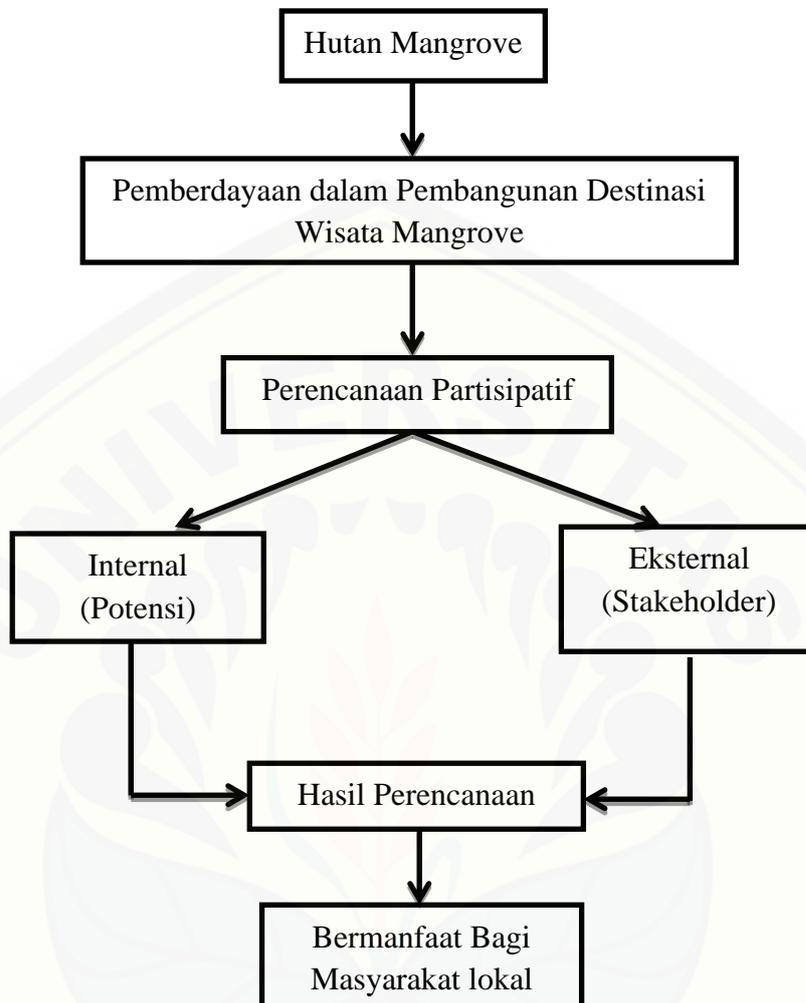
2.7 Kerangka Konseptual Teoritik

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Oleh karenanya dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa menjadikan kelompok/masyarakat dan pemerintah desa memiliki rencana dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan melibatkan masyarakat lokal di desa agar masyarakat dapat berdaya dengan adanya pembangunan destinasi wisata mangrove tersebut. Perencanaan untuk megembangkan hutan mangrove tersebut membutuhkan beberapa proses salah satunya yakni pembuatan peraturan desa untuk menjadikannya sebagai landasan atau legalitas ekowista mangrove tersebut. Dengan adanya ekowisata mangrove tersebut akan menjadikan desa mayangan sebagai desa wisata yang memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, dan meningkatkan perekonomian. Masyarakat dapat berkontribusi dalam penyewaan perahu, jasa penitipan kendaraan, dan masih banyak lagi. Apabila potensi hutan mangrove tersebut dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, maka akan terjaminnya kesejahteraan pada masyarakat tersebut.

Dalam pengembangan ini ada faktor keadaan internal atau yang merupakan potensi lokal dan kemudian yang harus ditekankan dalam penelitian

ini adalah para stakeholder yang berkepentingan sebagian merupakan bagian dari eksternal mereka. Dalam menjalankan itu maka potensi-potensi yang diintegrasikan maka yang harus dilakukan adalah proses perencanaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.



Bagan 2.1. Kerangka Konseptual Teoritik

Sumber: Diolah oleh Peneliti 21 Agustus 2019

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab dan menganalisis masalah yang diteliti. Dengan adanya metode penelitian memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam. Menurut Sugiyono (2014:1) “metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” sedangkan menurut (usman dan Akbar, 2006) Metode merupakan suatu prosedur atas cara untuk mengetahuisesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa metode penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Didalam melakukan penelitian seseorang peneliti membutuhkan pendekatan agar dapat memaknai fenomena yang dianggap menarik bagi peneliti. Dalam hal ini akan mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam tentang Perencanaan Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Untuk menemukan makna dibalik fakta yang terkait dengan judul penelitian tersebut maka peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2004:1) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” penjelasan mengenai metode kualitatif juga diungkapkan oleh Gunawan (2014:80) yang mengatakan bahwa metode kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang porspektif berdasarkan penelitian sendiri. Karena berkaitan dengan respon manusia yang cenderung dinamis dan tidak dapat diprediksi maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2012:68).

Penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan upaya untuk menggambarkan kondisi, situasi fenomena sosial yang ditemukan dilapangan secara mendalam terkait penelitian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Perencanaan Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.3 Metode Penentuan Lokasi

Menemukan lokasi merupakan tahapan penting didalam melakukan penelitian. Dengan memiliki lokasi yang tepat maka penelitian yang dilakukan akan lebih bermakna karena intinya menemukan fakta-fakta yang menarik untuk di kaji lebih dalam. Subagyo (1997:35) menemukan bahwa:

“lokasi penelitian sebagai saran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya lokasi penelitian yang baik yaitu lokasi atau obyek penelitian sesuai dengan obyek permasalahannya”.

Didalam menentukan lokasi penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Yang dimaksud dengan *Purposive* adalah teknik penentuan yang di tentukan secara sengaja, sesuai kriteria terpilih yang relavan dengan masalah dan tujuan penelitian (Bungin, 2008:107). Peneliti memilih lokasi di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian. Alasan peneliti memilih Desa Mayangan sebagai tempat penelitian karena Desa Mayangan telah memiliki dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan wisata yang berbasis partisipasi masyarakat lokal. Dengan

adanya Perencanaan untuk Wisata mangrove akan menjadikan kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan meningkatnya perekonomian masyarakatnya.

3.4 Metode Penentuan Informan

Informan merupakan aspek penting bagi penelitian karena dengan informan yang tepat maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti Moleong (2007:132) mengatakan bahwa informan adalah:

“orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus punya pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat informal. Sebagai tim dengan kebaikannya dan dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar belakang tersebut”

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang akan digunakan adalah teknik *purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2014:52) *purposive sampling* adalah penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai atau dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sugiyono (2014:56) menyebutkan bahwa untuk menentukan informan sebagai sumber data harus memenuhi beberapa kriteria seperti: a) Mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui informan (mempelajari) sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi dihayati; b) Mereka yang masih terlibat pada kegiatan atau aktifitas yang sedang diteliti; c) Mereka yang mempunyai waktu untuk di mintai informasi hasil “kemasannya” sendiri, maksudnya informasi yang di sampaikan tidak di buat-buat; d) Mereka yang awalnya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga menarik untuk dijadikan nara sumber.

Dari kriteria yang sudah dijelaskan diatas maka penelitian ini akan menggunakan dua jenis informan.

3.4.1 Informan Pokok

dalam menentukan informan pokok, peneliti memiliki persyaratan khusus agar nantinya data yang diperoleh akan lebih jelas. Kriteria yang dimaksud adalah:

- a. Inisiator dari Kelompok Masyarakat Pengawas
- b. Anggota Kelompok Sadar Wisata
- c. Perangkat Desa Mayangan
- d. Tokoh Masyarakat di Desa Mayangan

Berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan diatas maka informan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan Pokok

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	ALAMAT
1.	MS	60	Laki-laki	Ketua POKMASWAS	Dusun Sumpersari, Desa Mayangan
2.	IG	47	Laki-laki	Sekretaris POKDARWIS	Dusun Sumpersari, Desa Mayangan
3.	SL	50	Perempuan	Kepala Desa Mayangan	Dusun Sumpersari, Desa Mayangan
4.	TN	59	Laki-laki	Sekretaris Desa Mayangan	Dusun Muneng, Desa Mayangan
5.	SN	55	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Dusun Sumpersari, Desa Mayangan
6.	RY	56	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Dusun Muneng, Desa Mayangan

Sumber: Dokumen Peneliti

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005:172). Informan tambahan diperlukan untuk mendukung data yang diberikan oleh informan pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah:

- a. Masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove sebagai tempat memancing/menjaring ikan. Peneliti menggunakan informan tambahan yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove sebagai tempat

memancing ikan/menjaring ikan karena peneliti ingin melihat ketergantungan informan terhadap sumber daya yang ada di hutan mangrove tersebut.

- b. Masyarakat yang tinggal didekat kawasan hutan mangrove. Peneliti menggunakan informan tambahan yang bertempat tinggal didekat kawasan hutan mangrove karena peneliti ingin melihat respon masyarakat yang nantinya kawasan tersebut akan menjadi tempat wisata baru.

Berikut adalah data informan tambahan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Data Informan Tambahan

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	ALAMAT
1.	MN	65	Laki-laki	Wiraswasta	Dusun Kalimalang Desa Mayangan
2.	JR	48	Perempuan	Wiraswasta	Dusun Kalimalang Desa Mayangan
3.	ST	51	Perempuan	Wiraswasta	Dusun Kalimalang Desa Mayangan

Sumber: Dokumen Peneliti

3.5 Metode Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data seseorang peneliti harus menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh kelengkapan data. Menurut Sugiyono (2014:64) Metode pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah menepatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:43) “observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Observasi dilakukan untuk memperoleh banyak gambaran yang jelas. Sarwono (2006:224) pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data sebanyak

ungkinan. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan. Faisal (2005:52) metode observasi menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.

Herdiansyah (2013: 145) menjelaskan bahwa observasi terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

1. *Participant observer*

Peran dalam observasi yang dipilih observasi untuk mengambil bagian dan terlibat langsung dengan aktifitas yang dilakukan subjek penelitian.

2. *Non Participant Observer*

Peran dalam observasi yang dipilih dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas subjek penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan observasi Non Participant. Peneliti tidak ikut dalam aktivitas pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan wisata mangrove yang ada di desa mayangan. Tetapi peneliti mengambil momen dimana aktivitas perangkat desa tersebut melakukan perencanaan terhadap wisata mangrove, pada saat itulah peneliti melakukan observasi.

Menurut Sugiyono (2014:68) obyek penelitian dalam kualitatif yang observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Sugiyono maka tempat penelitian akan dilakukan di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pelaku yang akan di observasi adalah partisipasi masyarakat lokal dalam melakukan perencanaan wisata mangrove. Aktivitas yang akan di observasi adalah kegiatan masyarakat dan perangkat desa dalam melakukan perencanaan wisata mangrove.

Observasi ini dilakukan secara langsung dengan sengaja pada saat informan senggang atau dalam keadaan beristirahat di rumah. Hal ini dilakukan kepada informan pokok dan informan tambahan. Dalam penelitian ini observasi fokus pada perencanaan dan fenomena yang terjadi pada saat merencanakan

destinasi wisata yaitu berupa perencanaan yang di diskusikan bersama masyarakat lokal.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esberg (2002) dalam Sugiyono (2014:72) mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Herdiansyah (2013:63-64) membagi wawancara kedalam tiga bentuk yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Dalam bentuk wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan dalam bentuk *guideline interview*. Peneliti hanya tinggal membacakan pertanyaan dan subyek penelitian tinggal menjawab sesuai jawaban yang disediakan sehingga tidak ada jawaban lain selain jawaban yang disediakan.

2. Wawancara semi terstruktur

Dalam bentuk wawancara semi terstruktur, peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Sehingga tidak ada pernyataan yang disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara sebagai pedoman penggalan data.

3. Wawancara tidak terstruktur

Dalam bentuk wawancara tidak berstruktur, hampir sama dengan wawancara semi terstruktur, namun wawancara ini memiliki banyak kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

Dari jenis-jenis wawancara diatas peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini dinilai peneliti sebagai teknik yang tepat karena jika menggunakan wawancara terstruktur maka informasi yang akan didapatkan tidak akan detail namun jika menggunakan wawancara tidak

terstruktur maka hasil wawancara di khawatirkan akan bertolak belakang dengan keinginan peneliti.

Sebelum melakukan wawancara Sugiyono (2014) menjelaskan ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu:

1. Perihal wawancara

Menurut Sugiyono (2014:76) terdapat tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan

Tahap pertama, peneliti menetapkan informan pokok dan tambahan yang akan diwawancarai guna mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

- b. Menyiapkan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan

Tahap kedua, peneliti menyiapkan pokok-pokok masalah atau hal yang akan digali dari informan pokok maupun tambahan.

- c. Mengawali atau membuka alur wawancara

Tahap ketiga, peneliti mulai membuka alur wawancara dengan memperkenalkan diri maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti kepada informan.

- d. Melangsungkan alur wawancara

Tahap keempat, peneliti melangsungkan wawancara yang sesuai dengan guide interview yang telah disusun.

- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya

Tahap kelima, peneliti sedikit merangkum hasil dari wawancara yang dilakukan dan mengikhtisiar hasil wawancara dengan cara mengulang beberapa informasi yang diberikan oleh informan kepada peneliti dan kemudian mengakhiri wawancara.

- f. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapang

Tahap keenam, kegiatan wawancara selesai peneliti menulis hasil wawancara kedalam catatn lapangan yang berupa catatan kecil yang ditulis setelah wawancara selesai dilakukan dengan dapat mendengar hasil rekaman wawancara

- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh
Tahap ketujuh, tahap dimana peneliti harus menindaklanjuti hasil wawancara yang diperoleh dari informan.

2. Alat wawancara

Menurut Sugiyono (2014:81) alat-alat yang diperlukan didalam wawancara yaitu:

- a. Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, tau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat mencatat (bila diperlukan).
- b. Tape Recorder yang berfungsi untuk merekam semua percakapan atau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
- c. Kamera yang berfungsi untuk memotret kondisi wawancara, ketika peneliti sedang melakukan perbincangan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto atau gambar tersebut, maka tingkat keabsahan peneliti akan lebih terjamin, sebab peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:149) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, sehingga dalam pelaksanaan metode dokumentasi dapat menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2014:82) dokumen mempunyai berbagai macam bentuk seperti:

- a. Berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi
- b. Berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan sketsa
- c. Berbentuk karya seni seperti gambar atau film

Dari macam-macam bentuk dokumentasi diatas peneliti dapat menggunakan semua bentuk namun dengan catatan keadaan dilapangan mendukung untuk memperoleh bentuk dokumentasi tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

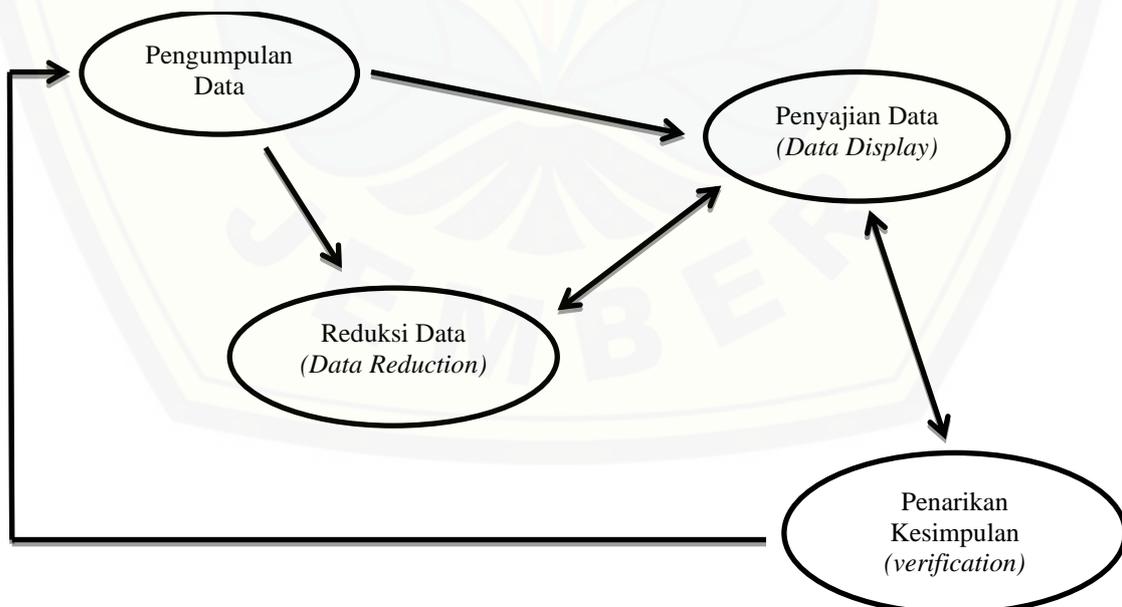
Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2005:244)

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengkoordinasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan orang lain.”

Subagyo (1997:104) menyatakan bahwa analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena menganalisa data yang ada akan membantu untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan jenis analisis berdasarkan pendapat Miles & Huberman 1984 dalam (Sugiyono, 2011) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

Bagan 3.1. Teknik Analisis Data Miles & Huberman



a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Hal yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah melakukan proses pengumpulan data yang sejak awal telah ditentukan. Data observasi, wawancara dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni aspek deskriptif dan aspek reflektif. Catatan deskriptif merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi tentang kesan, komentar, atau tafsir peneliti tentang penemuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya (Idrus, 2009:148)

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdapat dalam proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang di kumpulkan oleh peneliti dengan cara mencatat informasi-informasi penting yang akan di gunakan untuk data sebagai hasil penelitian, pengumpulan data juga dilakukan oleh peneliti melalui aktivitas informan-informan yang melakukan FGD di balai Desa Mayangan tidak hanya itu peneliti juga mengumpulkan data melalui kegiatan masyarakat dalam survey lapang untuk melakukan pembangunan destinasi wisata yang masih dalam perencanaan.

b. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, perumusan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga diartikan sebagai kegiatan merangkum data yang telah terkumpul, dalam hal ini peneliti memilih hal-hal yang pokok saja atau menfokuskan pada hal-hal yang di anggap penting (Miles & Huberman, 2009:62)

Data-data mentah hasil wawancara yang diperoleh peneliti dicatat secara cermat dan terinci untuk dipilih dengan cara memilah-milah, disederhanakan dan difokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk lebih bisa dimengerti dengan bahasa yang sederhana.

c. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Selanjutnya melakukan proses reduksi data yang dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan, dan teks naratif. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan ringkas, mudah dimengerti tanpa bermaksud mengurangi kualitas dari data yang ada.

Dalam penyajian data ini peneliti mengumpulkan informasi yang telah di sederhanakan dan peneliti harus menarik kesimpulan yang sudah di dapat dengan tahap reduksi data. Penyajian data ini memberikan suatu ringkasan kesimpulan dalam bentuk teks naratif dan bagan sehingga dapat mempermudah untuk dimengerti.

d. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:153) merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum pasti namun setelah diteliti menjadi lebih jelas, dan dapat berupa hubungan kasual atau intraktif, hipotesis, atau teori. Data yang telah disajikan kemudian dengan akan ditarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang di peroleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis sehingga dapat dijelaskan dari permasalahan yang dikemukakan.

Tahap penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang dirasakan/dialami oleh informan untuk segera di kemukakan untuk mengetahui teori, dan hipotesis apa yang pantas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dalam suatu data yang ada.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga

menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dengan tujuan mengetahui adanya alasan-alasan terjadi perbedaan.

Menurut Denzim dalam Moleong (2012:124) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif;
- b. Triangulasi Metode, menurut Patton (Moleong, 2012:120) terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;
- c. Triangulasi Teori, menurut Licoln dan Guba (Moleong, 2012:122) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Membandingkan data dengan cara triangulasi sumber bertujuan untuk mencari kebenaran suatu data. Karena terkadang data-data yang didapat tidak terlepas dari subjektifitas informan. Dengan adanya perbandingan data ini maka data yang didapatkan akan bersifat objektif dan valid. Proses ini juga dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini membandingkan data dari sumber satu dengan sumber yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, tujuan pustaka, hasil penelitian maupun pokok pembahasan. Maka pada bab terakhir ini peneliti akan menarik kesimpulan tentang Perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis partisipasi masyarakat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis masyarakat lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1. Proses perencanaan destinasi wisata mangrove di Desa Mayangan dilakukan dengan mengelaborasi dukungan serta hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perencanaan pembangunan destinasi wisata mangrove ini dilalui dengan 10 tahapan yakni: pengumpulan informasi; Persiapan Perencanaan; Survei Lapang; Diskusi dengan Pihak-pihak terkait; Penyusunan Perencanaan; Sosialisai Hasil Perencanaan; Pemantapan Konsep; Inisiasi Pembuatan Perdes tentang Wisata Mangrove; Penyusunan Rencana Aksi & Bussines Plan dan Pelaksanaan/Eksekusi Hasil Perencanaan.
2. Perencanaan destinasi wisata mangrove di Desa Mayangan ini adalah perencanaan yang bersifat *bottom-up* yang perencanaannya berawal dari partisipasi masyarakat lokal di Desa Mayangan. Masyarakat juga sadar akan pencapaian yang nantinya didapat apabila wisata tersebut berdampak baik bagi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Mayangan. Oleh karnanya kelompok masyarakat/masyarakat lokal ikut berpartisipasi dalam perencanaan yang akan dilakukan untuk membangun suatu wisata alam yakni wisata mangrove, berikut masyarakat/kelompok sosial yang turut berpartisipasi: Pokmaswas, Pokdarwis, Masyarakat Lokal, Kelompok Nelayan Bahari Lestari, Perangkat Desa serta tokoh-tokoh masyarakat.
3. Beberapa capaian yang akan didapat dalam keberhasilan perencanaan destinasi wisata mangrove di Desa Mayangan ini tentunya akan membawa

masyarakat menjadi memiliki pendapatan baru dari destinasi wisata tersebut, terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat yang mengagur atau membutuhkan kerja sampingan, dan dalam perencanaan ini tentunya menghasilkan masterplan destinasi wisata mangrove yang mampu membawa destinasi ini menjadi destinasi yang menarik.

4. Legalitas tanah dalam perencanaan suatu pembangunan menjadi penting karena apabila belum jelas status tanah tersebut maka akan terhambat pembangunan destinasi wisata mangrove yang akan dilakukan oleh karena itu proses pembuatan peraturan desa tentang wisata mangrove masih terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu adanya saran dalam perencanaan destinasi wisata mangrove berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya dapat mensupport segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di Desa Mayangan yang menginginkan daerahnya memiliki tempat wisata alam untuk keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat lokal.
2. Pemerintah Desa Mayangan sesegera mungkin untuk mengurus tentang legalitas tanah di kawasan hutan mangrove tersebut ke Pemerintahan Kabupaten Jember, karena apabila tidak jelas kepemilikan tanahnya maka akan terhabatlah pembangunan wisata yang akan dilakukan di Desa Mayangan.
3. Bagi peneliti lain/selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, I. R. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Komunitas*. Jakarta: FISIP-UI-Press
- Adi. I.R. 2008. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Akbar, S.P dan H. Usman. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2002. *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif: komunikasi ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bengen, D. G. 2001. *Ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut serta pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Prosiding pelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu*. Bogor, 29 Oktober-3 November 2001.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Danhuri, R. 1996. *Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda Hutan Mangrove di Sumatera*. PPLH. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Demartoto, Argyo. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Fadeli, C. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas kehutanan. Universitas Gadjah Mada.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Huda, Miftahul. 2008. *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara
- Irene, I, A. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Pustaka Al_Kautsar
- Kusmana, C. 1997. *Metode Survey Vegetasi*. PT. Penerbit Intitut Pertanian Bogor: Bogor
- Kustanti, A. 2011. *Manajemen Hutan Mangrove*. IPB. Bogor
- Lewaherilla, N. 2002. *Pariwisata Bahari: Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Program Pasca Sarjana/S3. Bogor: IPB
- Miles, Mathew B & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Muhaerin, M. 2008. *Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove untuk Pengelolaan Ekowisata di Estuari Perancak, Jembaran, Bali* (Skripsi). Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Myrdal, G. 1968. *Asian Drama; An Inquiry into the Poverty of Pantheon*. New York
- Page, J and Connell, J. 2006. *Tourism – A Modern Synthesis*. London: Thomsom Learning.
- Prianto, E. 2005. *Proseding “Fenomena Aktual Tema Doktoral Arsitektur dan Perkotaan”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Purba, J. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Rutana, F, F. 2011. *Studi Kesusaian Ekosistem, Mangrove sebagai obyek ekowisata di pulau kapota taman nasional wakatobi sulawesi tenggara*. Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Santoso, Budhy. 2005. *Manajemen Pembangunan Berbasis Masyarakat (Perencanaan Pembangunan Partisipatif)*. Jember: Komunitas Alumni Perform Projects.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharti. 2000. *Potret Nelayan Kenjeran*. [Socialforum.hyoermart.net/_cusudi/00000007.html](http://socialforum.hyoermart.net/_cusudi/00000007.html). diakses pada tanggal 08 november 2018
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang UM Press
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation
- Usman, S. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yoeti, Oka. A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung

Jurnal:

Ahmad, Z. 2017. *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan desa wisata pada kampung bintang bekapur desa bintang buyu kecamatan teluk bintang kabupaten bintang*. Naskah Publikasi

Eva, K. Djamhur, H dan Luchman, H. 2018. *Peran masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata Tulungrejo kecamatan bumuaji Kota batu*. Vol.54 No 1 januari 2018

Purwowibowo dan Gianawati, Nur Dyah. 2016. *Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui Community Development*. Vol.1 No 1 oktober 2016

Ryando, P dan Asrinda. 2008-2011. *Peran pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata di desa buluh cina kecamatan siak hulu kabupaten kampar*.

Peraturan Perundang Undangan:

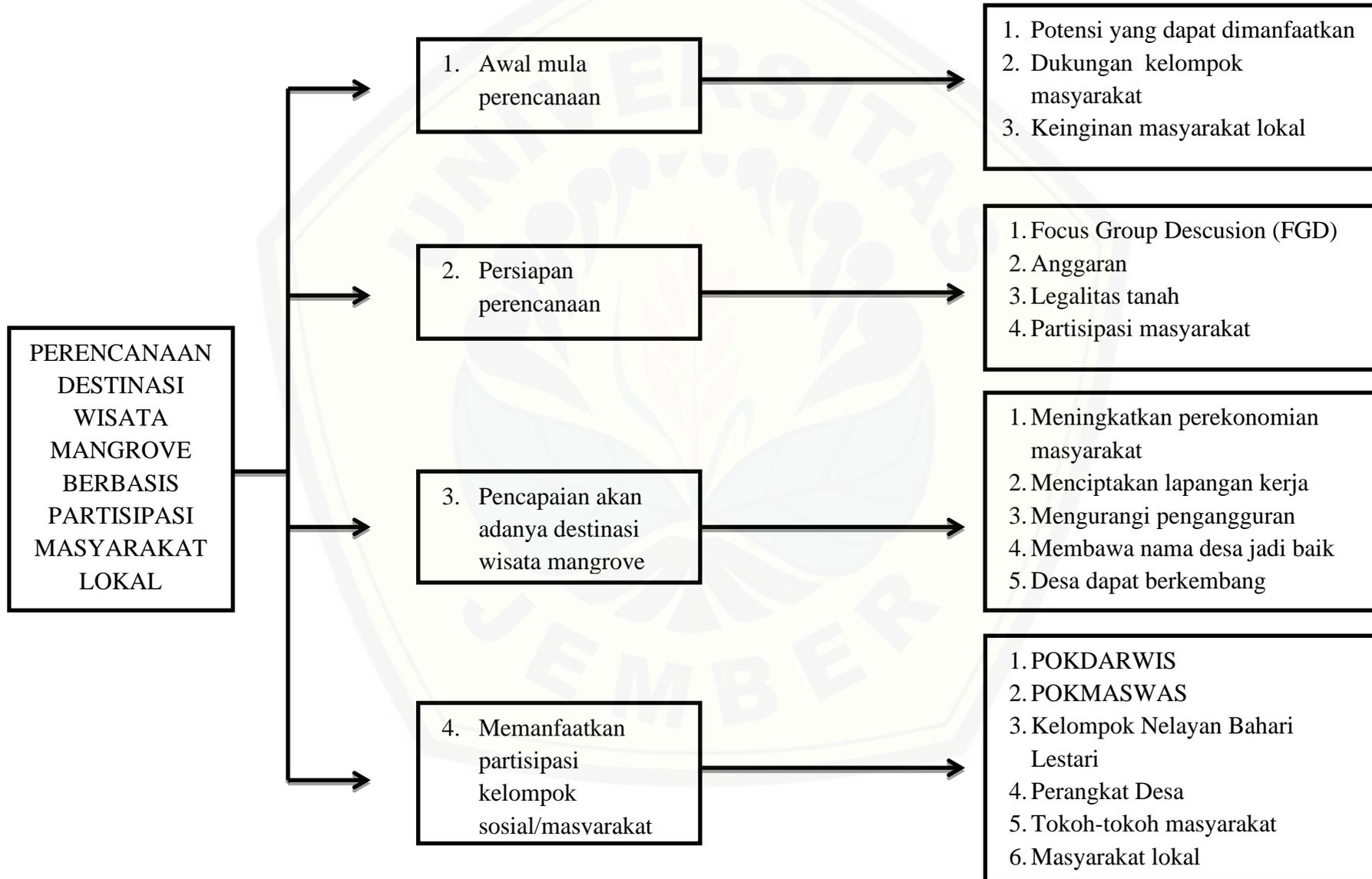
Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Pasal 206

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tersirat amanah untuk membentuk Pokmaswas. Pasal 67

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005. *Tentang Desa Berkewajiban untuk Mengelola Potensi Desa*.

LAMPIRAN A.

TAKSONOMI PENELITIAN
PERENCANAAN DESTINASI WISATA MANGROVE BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL



LAMPIRAN B.

PEDOMAN WAWANCARA

Guide Interview

WAWANCARA INFORMAN POKOK

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :

1. Sejak kapan ada keinginan untuk merencanakan adanya destinasi wisata mangrove?
2. Siapakah yang pertama kali berinisiatif untuk dibuat destinasi wisata mangrove?
3. Apakah tujuan dari perencanaan destinasi wisata mangrove?
4. Apa saja manfaat dari tanaman mangrove tersebut bagi lingkungan dan masyarakat?
5. Apa saja permasalahan yang dirasakan terkait dengan adanya hutan Mangrove tersebut?
6. Bagaimana perencanaan destinasi wisata mangrove tersebut dan Apa saja yang harus di persiapkan untuk membangun destinasi wisata mangrove?
7. Sejauh manakah perencanaan yang sudah dilakukan hingga sampai saat ini?
8. Apa saja hambatan yang dialami pada saat merencanakan pembangunan destinasi wisata mangrove?
9. Apakah ada dukungan dari pihak-pihak terkait? (ex: dinas perikanan)
10. Apakah ada anggaran dari pemerintah untuk perencanaan destinasi wisata mangrove tersebut?
11. Apakah dampak yang akan terjadi apabila perencanaan destinasi wisata tersebut berhasil?
12. Apakah perencanaan untuk membangun destinasi wisata tersebut melibatkan masyarakat sekitar?
13. Siapa saja masyarakat yang ikut berperan dalam perencanaan tersebut?
14. Bagaimana respon masyarakat dari adanya perencanaan destinasi wisata mangrove?

PEDOMAN WAWANCARA

Guide Interview

WAWANCARA INFORMAN TAMBAHAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Agama :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

1. Apakah anda mengetahui hutan mangrove di desa mayangan ini akan dibangun destinasi wisata mangrove?
2. Bagaimana tanggapan/respon anda terkait dengan rencana pembangunan destinasi wisata mangrove tersebut?
3. Apa saja manfaat hutan mangrove ini menurut anda?
4. Apakah perencanaan pembangunan destinasi wisata mangrove ini berpengaruh terhadap anda nantinya?
5. Apakah anda ikut berperan dalam menjaga, memelihara dan merencanakan destinasi wisata mangrove ini?
6. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat untuk merawat hutan mangrove tersebut?
7. Apakah anda mendukung perencanaan pembangunan destinasi wisata mangrove tersebut?
8. Jika anda mendukung perencanaan tersebut, dalam bentuk apakah?

LAMPIRAN C. TRANSKIP ANALISIS DATA

KATEGORI	DATA AWAL	REDUKSI DATA	DATA DISPLAY	KESIMPULAN/ VERIVIKASI
<p>Awal mula Perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ya sebenarnya sudah lama ada omongan dari masyarakat, tapi baru tahun kemaren sekitar bulan agustus itu mulai ada pembicaraan dan kelompok-kelompok sempat di kumpulkan di balai desa untuk merencanakan pembangunan destinasi wisata mangrove. (MS: 27 Januari 2019) • Ya kami bersama temen-temen ya akhirnya kita andaikan menjadi tempat wisata sehingga waktu itu saya tanam mangrove sedemikian rupa karena yang paling selatan itu yang paling lebar, dan sekitar 10 meter di timur itu akan direncanakan pembangunan untuk warung-warung kalau yang di utara itu memang kita rencanakan untuk ini barangkali ada anak-anak yang mau kemah ya memang kita rencanakan wisata akhirnya kita berhubungan dengan ibu-ibu yang mengurus wisata itu sehingga kita bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah lama ada pembicaraan dari masyarakat, dan baru bulan agustus kemarin mulai ada diskusi kelompok-kelompok juga di kumpulkan di balai desa untuk merencanakan pembangunan destinasi wisata mangrove. • Kami dan teman-teman akhirnya berandai-andai bisa jadi tempat wisata. Saya tanam mangrove sedemikian rupa karena yang paling selatan paling lebar dan sekitar 10 meter ditimur akan direncanakan untuk pembangunan warung-warung kalau di utara memang kita rencanakan untuk anak-anak berkemah. Memang kita rencanakan wisata akhirnya kita berhubungan dengan ibu-ibu yang mengurus wisata sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah lama ada keinginan dan pembicaraan dan baru sekitar bulan juli-agustus 2018 mulai ada diskusi antara kelompok masyarakat, perangkat desa untuk merencanakan pembangunan destinasi wisata mangrove. • Inisiatif menanam mangrove pertama kali dilakukan oleh bapak masruchin selaku ketua kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dan setelah pohon mangrove tersebut besar ibu kepala desa memiliki ide untuk memanfaatkan mangrove tersebut menjadi wisata alam yang bermanfaat untuk masyarakat. • Tahun 2019 ibu kades menganggarkan dana untuk memulai perencanaan pembangunan wisata mangrove. 	<p>Hutan mangrove di Desa Mayangan memiliki potensi yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan mangrove menjadi wisata alam. Kepala desa, ketua POKMASWAS dan masyarakat desa juga telah mendiskusikan perencanaan destinasi wisata mangrove yang nantinya akan melibatkan banyak masyarakat.</p>

	<p>kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Untuk Pokdarwisnya itu di ketuai oleh Muhammad Kholiliwah Yakin yang lebih muda kalau ke saya semua malah jadi gak karu-karuan. Kalau Pokmaswas itu ya saya sendiri ketuanya. (MS: 27 Januari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya sudah dari dulu ada keinginan untuk di adakannya wisata alam ya, tapi masih belum ada tindakan juga gitu. Ya baru-baru ini ada perencanaan untuk wisata mangrovenya (IG: 10 Februari 2019) • Pertama ya itu pak ruhin, terus ya di setuju dan di dukung oleh kelompok masyarakat. Dan baru-baru ini di adakan rencana pembangunan wisata itu ya. Untuk sekarang juga masih menyiapkan proposal dan peraturan desa juga (IG: 10 Februari 2019) • Sebenarnya sudah lama ya, jadi dari 2 tahun yang lalu sudah ada pemikiran saya itu pengen setelah melihat lokasi itu belum begitu 	<p>kita bentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah dari dulu ada keinginan membangun wisata alam tapi masih belum ada tindakan dan baru-baru ini ada perencanaan lagi. • Pertama pak ruhin lalu disetujui dan didukung oleh kelompok masyarakat. • Sudah dari 2 tahun lalu ada pemikiran saya ingin setelah melihat lokasi itu belum besar dan saya ingin mengembangkan untuk jadi obyek wisata alam. Karena memang saat itu masih terkendala dana, baru tahun ini sudah bertekad harus ada aksi untuk wisatanya. • Saya berdiskusi sama yang menanam mangrove kalau dikembangkan menjadi obyek wisata akan lebih bermanfaat, selain untuk alam juga untuk manusianya. • Sudah lama ada keinginan dan pemikiran untuk dijadikan tempat wisata dan baru akhir-akhir ini sekitar 		
--	---	---	--	--

	<p>besar, dan saya ingin di kembangkan untuk menjadi obyek wisata alam, tapi karna ya memang saat itu terkendala dana untuk pengalokasiannya dan disini kalau infrastruktur yang lebih urgent lah harus didahulukan dan akhirnya hanya sekedar saya ngomong-ngomong mungkin ada masukan atau saran dari yang lain. Baru tahun ini sudah tekad harus ada action untuk disana (SL: 07 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saya, saya sendiri. Saya ngomong-ngomong sama yang menanam mangrove itu, kalau ini dikembangkan menjadi obyek wisata ini akan lebih bermanfaat lagi selain untuk alam juga untuk manusianya • (SL: 07 Februari 2019) • Sebenarnya sudah lama ada keinginan dan pemikiran untuk dijadikan tempat wisata, dan baru akhir-akhir ini sekitar bulan agustus lalu itu di bicarakan lagi dengan bu kades dan masyarakat untuk pembangunan wisata mangrove 	<p>bulan agustus lalu di bicarakan lagi dengan bu kades dan masyarakat untuk pembangunan wisata mangrove.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awalnya bu kades yang punya rencana lalu didukung dengan bapak masruchin selaku ketua Kelompok Masyarakat Pengawas yang punya daerah mangrove. • Keinginan sudah lama tetapi baru dibicarakan lagi sekitar bulan juli 2018, masyarakat punya gagasan bahwa mayangan memiliki potensi mangrove yang perlu digali dan dimanfaatkan. • Dulu yang berinisiatif menanam mangrove itu POKMASWAS lalu mangrovenya sudah besar dan bu kades memiliki ide untuk menjadikan potensi tersebut menjadi wisata alam. • Rencana masyarakat sebenarnya itu dari dulu karena menunggu respon dari kepala desa sebelum 		
--	---	--	--	--

	<p>(TN: 29 Januari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalau awalnya emang bu kades yang punya rencana seperti itu, lalu di dukung dengan bapak musruchin ketua Kelompok Masyarakat Pengawas yang punya daerah sanalah. (TN: 29 Januari 2019) • Sebenarnya keinginannya sudah lama tetapi baru di bicarakan lagi sekitar bulan juli 2018 lalu, masyarakat punya gagasan bahwa potensi mayangan itu ada mangrove yang perlu di gali dan di manfaatkan (SN: 29 Januari 2019) • Kalau dulu yang berinisiatif untuk penanaman mangrovenya itu POKMASWAS lalu mangrovenya sudah besar-besar ibu kades punya ide untuk menjadikan potensi tersebut menjadi wisata alam. (SN: 29 Januari 2019) • Kalau rencana sebetulnya masyarakat dari dulu ya itu masyarakat, karena menunggu respon dari kepala desa sebelum 	<p>ibu sulimah yaitu bapak sunardi, yang dilakukan masyarakat dulu hanya bisa ngomong dan tidak ada tindakannya. Sekitar bulan juli 2018 baru ada tindakan lanjut dari desa untuk perencanaan potensi mangrove di desa mayangan. Tidak tau juga nanti kedepannya seperti apa yang penting kita buka dulu untuk wisatanya, kalau kita tidak buka dulu mungkin hanya khayalan dan bayangan aja. Alhamdulillah kita renbukan sama bu kades dan beliau juga merespon untuk tahun ini akan dianggarkan dana untuk wisata mangrove.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat punya inisiatif tapi tidak ada tindak lanjutnya, semenjak bulan juli baru masyarakat dan perangkat desa mulai survey ke tempat mangrove. Alhamdulillah kemarin diadakan rapat untuk wisata harus dipoitifkan dilaksanakan. 		
--	---	---	--	--

bu sulimah yakni pak sunardi karena masyarakat waktu itu kan Cuma bisa ngomong aja gitu tidak ada tindakannya. Mulai dulu ya kalau mau ngadain sesuatu itu hanya ngomong-ngomong saja gak pernah langsung turun lapangan. Sekitar bulan juli itu baru ada tindak lanjut dari desa untuk perencanaan potensi mangrove di desa mayangan. Gak tau juga nanti kedepannya seperti apa yang penting kita buka dulu ya untuk wisatanya, kalau kita ngak buka dulu ya mungkin hanya khayalan dan bayangan-bayangan saja gitu. Tapi alhamdulillah kita rembukan sama bu kades dan beliau juga ngerespon untuk tahun ini akan di anggarkan dana untuk wisata mangrove.

(RY: 29 Januari 2019)

- Sebenarnya masyarakat punya inisiatif tapi tindak lanjutnya tidak ada ya semenjak bulan juli itu barulah masyarakat dan perangkat desa memulai sambil survey ke mangrove tersebut. Tapi alhamdulillah kemaren ada rapat ya dan itu pun untuk wisata

	<p>dipositifkan harus dilaksanakan ya. (RY: 29 Januari 2019)</p>			
<p>Persiapan perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau persiapan yang kemarin itu udah di rembukan katanya mau di bangun kolam air tawar kan orang kalau sudah dari laut itu kan risih ya kalau gak segera di bilas dengan air tawar dengan ukuran 8x6 meter itu sudah cukup ya, yang perlu di bangun juga itu kesekretariatan, toilet, jembatan gantung itu sebenarnya mahal ya tapi hasilnya juga akan bagus, kantin-kantin juga akan di bangun di dalamnya yang penting modalnya ada ya akan terealisasi pembangunannya ini. (MS: 27 Januari 2019) • Masih banyak sekali yang harus di siapkan, terutama ya dari dananya dulu itu nomer satu untuk pembuatan tempat makan/kantin dan rencananya 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan yang sudah dirembukan itu mau di bangun kolam air tawar, karena orang kalau sudah dari laut akan risih kalau tidak segera di bilas dengan air tawar. Nanti akan di buat kolam dengan ukuran 8x6 meter itu sudah cukup. Yang perlu dibangun juga itu kesekretariatan, toilet, kalau jembatan gantung sebenarnya juga mahal ya tapi hasilnya juga akan bagus, kantin-kantin juga akan dibangun di dalam wisatanya, yang terpenting modalnya ada pasti akan terealisasi. • Banyak sekali yang harus disiapkan, terutama dari dananya terlebih dahulu dan untuk pembangunan tempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan yang telah direncanakan adalah pembangunan kolam air tawar, kesekretariatan, toilet, dermaga, kantin, jalan paving, gazebo dan pintu masuk. • Anggaran merupakan hal terpenting dalam perencanaan dan pembangunan wisata karena apabila dana tidak ada maka pembangunan wisata mangrove tidak akan terlaksana. Setelah jelas tentang legalitas tanah mangrove tersebut perangkat desa akan langsung menyelesaikan perdes wisatanya. • Dalam perencanaan dan pembangunan wisata mangrove ini membutuhkan 	<p>Persiapan yang utama yang harus ada yakni anggaran/dana karena apabila dana tidak tersedia maka perencanaan dan pembangunan destinasi wisata mangrove ini tidak akan terealisasi. Koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti masyarakat sekitar, perangkat desa, tokoh masyarakat, POKMASWAS dan POKDARWIS sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan seperti: kolam air tawar, kesekretariatan, toilet, dermaga, kantin, jalan paving, gazebo dan pintu masuk. Perangkat desa juga akan menyelesaikan Perdes</p>

	<p>kantin itu di buat di dalam jadi kalau dari luar itu tidak kelihatan kalau ada kantin buat jaga-jaga kalau ada angin kencang biar pasir yang di pantai itu tidak langsung ke kantin jadi kalau di hadang sama mangrove gak akan langsung ke warungnya. Untuk warungnya nanti juga akan di seragamkan jadi tidak membangun warung sendiri kayak sistem sewa gitu. Untuk tahap pembangunan dermaga, denah memang sudah di buat untuk pelaksanaan pembangunannya mungkin 2019 akan di laksanakan, dan untuk gazebonya nanti kan akan di letakkan gazebo disana ntah nanti akan beli langsung yang bongkar-pasang terus di pasang sendiri di sana nanti. (IG: 10 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang pertama yang jelas ya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang pertama adalah masyarakat sekitar trus kepada penanam mangrove atau POKMASWAS dan POKDARWIS, untuk Perdesnya sudah mulai kita buat karna kalau 	<p>makanan/kantin akan direncanakan di dalam wisata jadi kalau dilihat dari luar itu tidak terlihat. Buat jaga-jaga juga kalau ada angin kencang biar pasir di pantai tidak langsung ke kantin jadi kalau di hadang sama mangrove tidak akan langsung ke warung-warungnya. Untuk warungnya juga nanti akan di seragamkan jadi tidak membangun warung-warung sendiri seperti sistem sewa gitu. Untuk tahap pembangunan dermaganya denah sudah dibuat dan pelaksanaan pembangunannya mungkin 2019 akan dilaksanakan, dan untuk gazebonya nanti akan langsung beli yang bisa di bongkar pasang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertama yang jelas koordinasi antara pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat sekitar, kepada penanam mangrove ataupun POKMASWAS dan POKDARWIS. Untuk Perdesnya sudah mulai kita 	<p>Koordinasi antara pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat sekitar, POKMASWAS, POKDARWIS.</p>	<p>tantang wisata mangrove tersebut apabila legalitas tanah kawasan hutan mangrove tersebut sudah jelas.</p>
--	--	--	---	--

	<p>membuat perdes kan harus tau kejelasannya dulu legalitas tanahnya itu kita perdeskan untuk wisatanya, sudah proses sih jadi ketika nanti sudah jelas dari kabupaten disini kita tinggal buat dan kita selesaikanlah untuk perdesnya. (SL: 07 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang harus dipersiapkan pastinya itu dana ya karna kalau tidak ada dana gimana kita mau bangun wisatanya, lalu kita sebagai perangkat desa juga harus saling berkoordinasi dengan masyarakat terutama pihak-pihak yang mengurus mangrove tersebut. Tapi untuk saat ini masih bingung dengan legalitas tanahnya ya jadi bu kades masih mengurus tanah kepemilikan daerah mangrove itu. Di takutkan nanti kalau sudah merencanakan dan sudah mulai bangun wisatanya malah ada masalah soal tanah nya (TN: 29 Januari 2019) • Dana anggaran tentunya, yang kedua kebijakan pemerintah desa, yang ketiga partisipasi masyarakat. 	<p>buat karena kalau membuat perdes harus tau kejelasan legalitas tanahnya itu kita perdeskan untuk wisatanya, untuk sekarang sudah proses jadi ketika nanti sudah jelas dari kabupaten kita tinggal selesaikan untuk perdesnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastinya yang harus dipersiapkan itu dana karena kalau tidak ada dana gimana wisatanya mau dibangun, dan kita sebagai perangkat desa harus saling berkoordinasi dengan masyarakat terutama pihak-pihak yang mengurus mangrove tersebut. Tapi untuk saat ini masih bingung dengan legalitas tanahnya, jadi bu kades masih mengurus tanah kepemilikan daerah mangrove itu. Ditakutkan nanti kalau sudah merencanakan dan sudah mulai bangun wisatanya akan menjadi masalah. • Dana anggran tentunya menjadi persiapan utama yang kedua kebijakan pemerintahan desa dan yang 		
--	--	---	--	--

	<p>(SN: 29 Januari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yo pasti anggaran toh, tapi sebelum kita ngomong anggaran ya kita harus punya perencanaan apa saja yang paling utama yang harus di kerjakan. Yang pertama kita harus buat pintu masuk dan dermaga ya itu yang paling peting, kalau kita ngawali dengan jembatan itu terlalu jauh, kalau untuk perjalanan ke pantai atau ke mangrovenya kita bisa nyiapkan perahu, terus jalannya juga ya nanti akan di pavingisasi 150 meter dan gazebo. Untuk kolan air tawarnya nanti itu kita buat semi permanen karna kalau di permanen itu membutuhkan biaya yag lumayan banyak ya, jadi untuk sementara kita anggarkan yang penting-penting dulu (RY: 29 Januari 2019) 	<p>ketiga partisipasi masyarakat juga penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pasti anggaran toh, tapi sebelum kita ngomong anggaran kita juga harus punya perencanaan yang paling utama yang harus dikerjakan. Pertama kita harus buat pintu masuk dan dermaga itu pembangunan yang paling penting, kalau kita mengawali pembangunan dengan jembatan itu terlalu jauh untuk perjalanan ke pantai atau ke mangrovenya kita bisa siapkan perahu, lalu jalannya nanti kita pavingisasi 150meter dan gazebo. Untuk kolam air tawarnya nanti kita buat semi permanen karena kolam air tawar membutuhkan anggaran banyak jadi kita dahulukan yang terpenting dahulu. 		
<p>Pencapaian akan adanya Destinasi Wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ya karena di daerah situ itu daerah nelayan ya kalau sudah musim kayak ini musim angin hujan itu kebanyakan nelayannya nganggur gak ada penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> •Karena disana daerah nelayan jadi kalau sudah musim angin dan hujan seperti sekarang ini banyak nelayan yang nganggur dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya perencanaan dan pembangunan destinasi wisata mangrove tersebut dapat mengurangi kerisauan masyarakat nelayan 	<p>Kawasan destinasi wisata mangrove merupakan tempat nelayan mencari nafkah dan apabila musim hujan dan angin masyarakat</p>

	<p>sehingga kami merencanakan itu ya intinya nanti mereka ada penghasilan dari wisata mangrove itu. (MS: 27 Januari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk masyarakat ya ikut senang, karena kan tujuannya yang pertama juga akan mengurangi pengangguran. Nanti disana akan ada tempat-tempat penjualan akan di bangun warung yang unik yang di tempat lain tidak ada seperti itu. (IG: 10 Februari 2019) • Yang pertama yaitu mengembangkan potensi desa yang nanti imbasnya ke perekonomian masyarakat, kesejahteraan perangkat karna nanti hasilnya kan masuk ke PAD juga bisa untuk mengangkat perekonomian masyarakat, kesejahteraan perangkat juga, setelah lancar nanti juga akan ikut terangkat dan bisa dikelolah oleh pengelolaan lain yaitu BUMDES. Jadi siapapun nanti kepala desanya nanti meneruskan harapannya bisa melanjutkan dan melestarikan syukur-syukur nanti 	<p>tidak ada penghasilan. Sehingga kami merencanakan sedemikian rupa yang intinya nanti mereka mempunyai penghasilan dari wisata mangrove tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat ikut senang karena tujuannya yang pertama juga akan mengurangi pengangguran dan nanti disana akan dibangun warung-warung yang unik untuk berjualan. • Pertama yakni mengembangkan potensi desa yang nanti imbasnya juga ke perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perangkat karena nanti sebagian hasilnya akan masuk ke PAD. Jadi siapapun kepala desanya nanti diharapkan dapat melanjutkan dan melestarikan wisata mangrovenya dan syukur-syukur nanti bisa dikembangkan lebih baik 	<p>dikarnakan apabila musim hujan dan angin nelayan akan menganggur sehingga wisata mangrove adalah solusi bagi masyarakat nelayan agar tidak menganggur dan mempunyai penghasilan dari wisata mangrove tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bayak dampak yang akan terjadi apabila perencanaan wisata mangrove ini berhasil seperti: mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan baru, dan pastinya akan membawa nama Desa Mayangan menjadi lebih baik lagi. 	<p>nelayan secara otomatis tidak akan pergi melaut oleh karnanya dilakukanlah perencanaan sedemikian rupa untuk membantu para nelayan dan masyarakat sekitar mempunyai penghasilan dari wisata mangrove tersebut. Tidak hanya memiliki penghasilan tambahan, masyarakat juga akan merasakan adanya peningkatan perekonomian, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan baru dan pastinya nama Desa Mayangan akan menjadi lebih baik dan dikenal oleh masyarakat luar.</p>
--	--	---	---	---

	<p>bisa mengembangkan. (SL: 07 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tujuannya itu ya supaya kalau sudah jadi nantinya pembangunan dan pengelolaan wisatanya itu lancar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat juga gitu, jadi kalau pun destinasi wisata mangrovenya sudah jadi tetap harus di jaga lingkungan dan keamanannya. (TN: 29 Januari 2019)• Kalau dampak positifnya sudah pasti akan membawa nama desa jadi baik, lalu perekonomian masyarakat juga akan meningkat, dan angka pengangguran di desa mayangan juga akan berkurang dengan adanya wisata mangrove nanti. Untuk dampak negatifnya itu kalau wisatanya sudah jadi ditakutkan akan ada sampah-sampah pengunjung, terkadang ada pengunjung yang tidak sadar akan kebersihan dari itu nanti akan banyak sampah yang berserakan. (TN: 29 Januari 2019)• Yang pertama karena potensinya	<p>lagi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tujuannya kalau nanti sudah jadi wisatanya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat jadi kalau pun destinasi wisata mangrove sudah jadi harus tetap dijagakelestarian lingkungan dan keamanannya• Dampak positifnya pasti akan membawa nama desa jadi baik, lalu perekonomian masyarakat juga akan meningkat, dan angka pengangguran di Desa Mayangan akan berkurang dengan adanya wisata mangrove nanti. Kalau dampak negatifnya ditakutkan akan ada sampah-sampah pengunjung di kawasan mangrove, karna terkadang ada pengunjung yang belum sadar akan kebersihan.• Karena Desa memiliki potensi yang sangat bagus dan bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk	
--	---	---	--

sangat bagus ya, nanti apabila itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu akan menambah penghasilan masyarakat tingkat kesejahteraannya itu akan meningkat itu yang pertama, lalu yang kedua nanti akan menambah lapangan pekerjaan disitu, yang ketiga desa saya akan terkenal.

(SN: 29 Januari 2019)

- Memang tujuannya dari bu kades itu untuk kedepannya ya melihat potensi wisatanya supaya bisa berkembang, karena dimana-mana sekarang setiap daerah punya wisata-wisata unggulan ya. Bisa juga untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekalian kalau kita buka kayak lapak-lapak ya mungkin untuk warga di sekitar sana kan enak mungkin bisa jualan gitu. Tapi insaallah juga akan di sediakan lapak-lapak di dalam wisatanya.

(RY: 29 Januari 2019)

- Ya mudah-mudahan perekonomian keluarga meningkat bisa buka

menambah penghasilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pasti meningkat dan juga bisa menambah lapangan pekerjaan baru di wisata mangrove. Dan pastinya desa saya akan terkenal.

- Tujuan dari bu kades kedepannya ya karena bisa melihat potensi wisata mangrove tersebut menjadi berkembang. Karena dimana-mana sekarang setiap daerah memiliki wisata unggulan. Jadi bisa juga untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

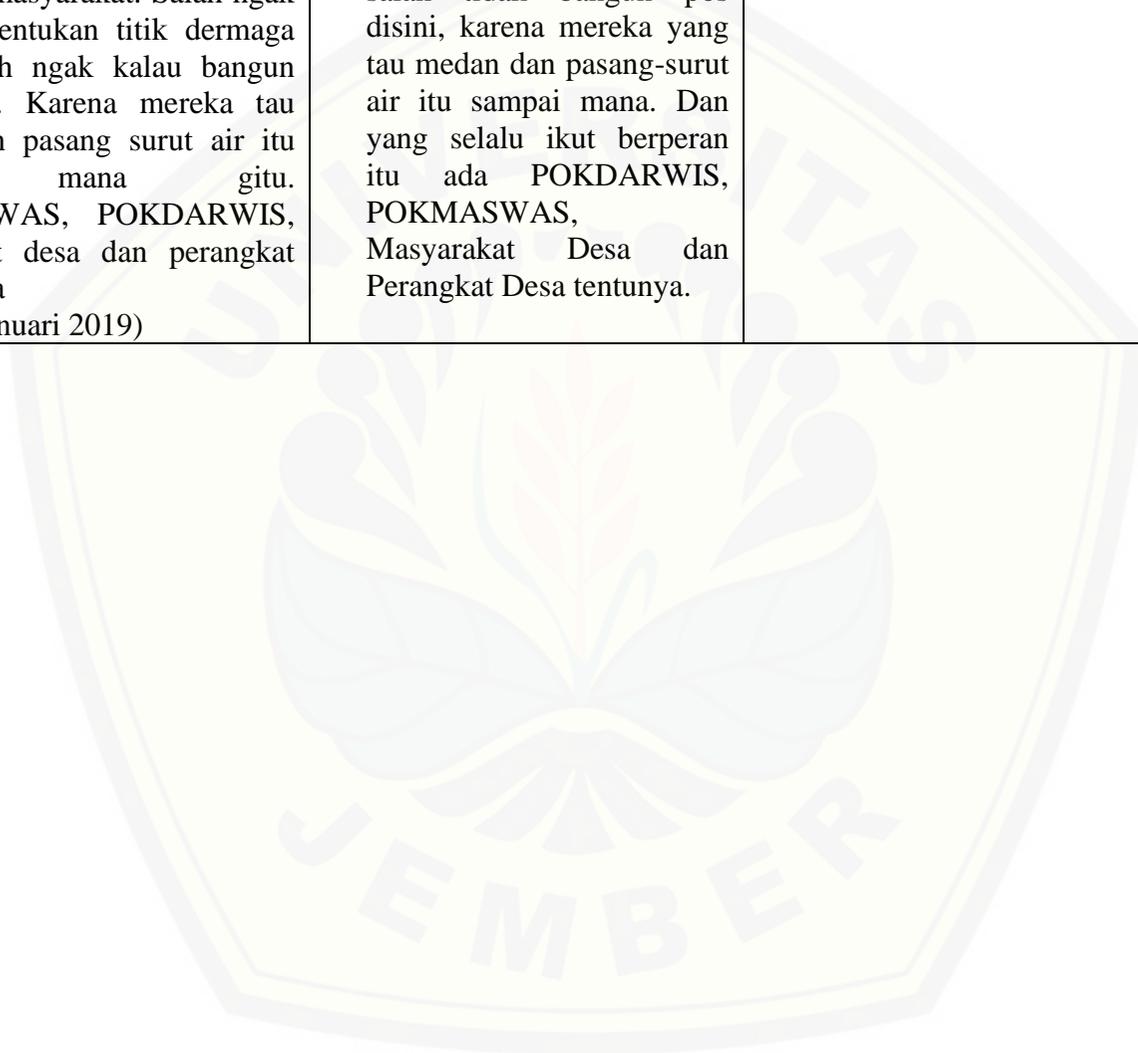
	<p>usaha makanan itu ya, buka di sekitar sini kan nanti boleh toh ya</p> <p>(Informan Tambahan MN : 02 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya sangat pengaruh sekali itu mbak kan juga bisa meningkatkan ekonominya masyarakat setempat juga kalau orang pinggiran itu sangat mengharapkan mbak adanya pembangunan wisata ini kalau orang yang gak punya usaha kan bisa buka usaha kayak jual kerupuk, es. (Informan Tambahan JR: 02 Februari 2019) • Iya kalau emang jadi nantik bisa dimanfaatkan sama masyarakat sini mbak, nanti jelas banyak yang kerja disana, seneng dah pasti orang sini. (Informan Tambahan ST: 03 Februari 2019) 			
<p>Memanfaatkan partisipasi kelompok sosial/masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasti masyarakat ikut terlibat ya sangat pasti, karna apa kita ini hidup ditengah-tengah masyarakat dan keinginan saya itu ingin mensejahterakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasti masyarakat ikut terlibat ya, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan saya berkeinginan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan memiliki keinginan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga apabila masyarakat 	<p>Dalam merencanakan sesuatu pasti akan ada persiapan yang harus dilakukan maka dari itu sangat di butuhkan</p>

	<p>masyarakatnya juga sehingga kalau masyarakat disana sudah terlibat langsung setidaknya-tidaknya ada kenaikan ekonomilah ya. (MS: 27 Januari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak sekali yang ikut berperan terutama POKDARWIS, POMASWAS, perangkat desa dan masyarakat setempat juga ikut terlibat tentunya (MS: 27 Januari 2019) • Perencanaan melibatkan masyarakat iya nanti masyarakat itu ikut merencanakan karna yang tau lokasi atau keadaan di pantai itu kan masyarakat, waktu pasang surutnya kapan dan airnya paling tinggi berapa meter, jadi sangat perlu juga partisipasi dari masyarakat sekitar. Dan nanti juga akan di rencanakan bagian-bagian seksi-seksi seperti seksi keamanan, seksi kebersihan dan lain-lain. (IG: 10 Februari 2019) • Iya banyak kelompok-kelompok yang ikut berperan terutama kelompok masyarakat pengawas, kelompok sadar wisata, kelompok 	<p>mensejahterakan masyarakat sehingga apabila masyarakat disana terlibat langsung setidaknya akan ada kenaikan ekonomi. Bayak sekali yang ikut berperan dalam perencanaan wisata ini terutama POKDARWIS, POKMASWAS, Perangkat Desa dan masyarakat setempat juga ikut berpartisipasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam perencanaan ini melibatkan masyarakat karena masyarakat mengetahui lokasi atau keadaan di pantai seperti waktu pasang-surut air di laut, ketinggian air berapa, jadi sangat perlu juga akan partisipasi masyarakat sekitar dan nantinya akan direncanakan juga bagian-bagian keamanan, kebersihan dan lainnya. Kelompok-kelompok masyarakat juga ikut berperann aktif terutama Kelompok Masyarakat Pengawas, Kelompok Sadar 	<p>terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan ini setidaknya akan ada kenaikan perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan ini melibatkan masyarakat karena yang mengetahui medan di kawasan pantai tersebut adalah masyarakat salah tidaknya bangun dermaga di titik ini, salah tidaknya membangun pos di titik ini. Jadi partisipasi masyarakat sangat penting sekali. • Beberapa kelompok yang ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan ini yakni; POKDARWIS, POKMASWAS, Kelompok Nelayan Bahari Lestari, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pastinya Masyarakat lokal. Partisipasi sangat diperlukan agar masyarakat semua merasa memiliki kawasan tersebut dan selalu menjaganya bersama-sama. 	<p>partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan wisata mangrove ini. Beberapa kelompok ikut berperan aktif dalam perencanaan ini yakni: POKDARWIS, POKMASWAS, Kelompok Nelayan Bahari Lestari, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pastinya Masyarakat lokal. Dengan demikian masyarakat lokal di Desa Mayangan akan merasa memiliki Kawasan Wisata Mangrove tersebut sehingga akan terjaga keamanan dan kelestarian alamnya.</p>
--	---	---	--	--

	<p>nelayan bahari lestari juga masyarakat di desa mayangan. (IG: 10 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loh iya, saya itu menginginkan mulai awal dari pembangunan sampai nanti pengoprasian itu masyarakat mayangan khusus semua yang bekerja, dan mungkin kalau perlu masyarakat dari luar itu ya teknisi-teknisnya saja karna gak mungkin juga orang mayangan gak ada yang ahli yang ada hanya pekerja kasar aja. (SL: 07 Februari 2019) • Ya terutama POKMASWAS, POKDARWIS, masyarakat sekitar, perangkat desa itu juga harus semuanya masuk agar mereka itu mengelola milik sendiri dan hasilnya juga untuk dinikmati sendiri. Dan kalau mereka yang bangun harapannya nanti jika sudah beroprasi mereka tetap berkecimpung di situ kan nanti juga merasa bahwa itu milik saya dan nanti saya juga akan mendapatkan sesuatu juga dari sini gak asal saya bekerja saya di ongkos harian habis itu selesai kan. 	<p>Wisata, Kelompok Nelayan Bahari Lestari dan juga masyarakat di Desa Mayangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saya sendiri menginginkan mulai dari awal pembangunan sampai nanti pengoprasian wisatanya itu khusus masyarakat mayangan semua yang bekerja, dan mungkin kalau perlu masyarakat dari luar hanya teknisi-teknisnya saja karena tidak mungkin juga orang Mayangan. Kebanyakan orang mayangan hanya ahli dalam pekerja kasar saja. POKMASWAS, POKDARWIS, Perangkat Desa dan masyarakat sekitar harus ikut mengelola wisatanya agar mereka menganggap itu semua milik sendiri dan hasilnya juga akan dinikmati mereka sendiri dalam artian lain “ada rasa memiliki” • Sudah pasti melibatkan masyarakat karena kita juga 		
--	--	--	--	--

	<p>(SL: 07 Februari 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah pasti melibatkan masyarakat ya, karna kita juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk bagaimana wisata ini kedepannya. Usul atau gagasan dari masyarakat itu juga penting, karena mereka juga yang tau keadaan dan kondisi pasang surut air laut sehingga nantinya kalau membangun dermaga tidak salah perhitungan. (TN: 29 Januari 2019) • Ada beberapa kelompok yang selalu ikut berperan ya, POKDARWIS, POKMASWAS, Kelompok nelayan bahari lestari, perangkat desa, ada juga tokoh-tokoh masyarakat. (TN: 29 Januari 2019) • Iya melibatkan masyarakat juga itu ya. Pertama tokoh masyarakat, tokoh agama ada kemarin ya, POKDARWIS dan POKMASWAS yang mempunyai kewenangan itu ya, terus perangkat desa. (SN: 29 Januari 2019) 	<p>memerlukan partisipasi masyarakat untuk bagaimana wisata ini berjalan kedepannya. Gagasan dari masyarakat juga sangat diperlukan, karena mereka juga yang mengetahui keadaan dan kondisi pasang-surut air laut sehingga nantinya kalau membangun dermaga tidak salah perhitungan. Beberapa kelompok yang selalu ikut berperan yakni, POKDARWIS, POKMASWAS, Kelompok Nelayan, Perangkat Desa ada juga tokoh masyarakat Desa Mayangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya melibatkan masyarakat juga itu, pertama tokoh masyarakat, tokoh agama, POKDARWIS, POKMASWAS yang mempunyai kewenangan disana, dan Perangkat Desa. • Kalau melibatkan masyarakat pasti, karena yang tau medan disana ya masyarakat sekitar kawasan 	
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">• Kalau melibatkan masyarakat ya pasti, karna yang tau medannya disana ya masyarakat. Salah ngak kalau menentukan titik dermaga disini salah ngak kalau bangun pos disini. Karena mereka tau medan dan pasang surut air itu sampai mana gitu. POKMASWAS, POKDARWIS, masyarakat desa dan perangkat tentunya ya (RY: 29 Januari 2019)	<p>pantai. Salah tidaknya bangun dermaga di titik ini, salah tidak bangun pos disini, karena mereka yang tau medan dan pasang-surut air itu sampai mana. Dan yang selalu ikut berperan itu ada POKDARWIS, POKMASWAS, Masyarakat Desa dan Perangkat Desa tentunya.</p>		
--	---	---	--	--



LAMPIRAN D. DOKUMENTASI



Wawancara dengan Informan Pokok MS



Wawancara dengan Informan Pokok RY



Wawancara dengan Informan Pokok SN



Wawancara dengan Informan Pokok TN



Wawancara dengan Informan Pokok SL



Wawancara dengan Informan Pokok IG



Wawancara dengan Informan Tambahan MN



Wawancara dengan Informan Tambahan JR



Wawancara dengan Informan Tambahan ST



Tanaman Mangrove di Desa Mayangan



Jembatan Penghubung antara Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas dengan Desa Mojomulyo Kecamatan Puger



Sungai pembatas antara Desa Mayangan dan Desa Mojomulyo



Rawa didalam Hutan Mangrove



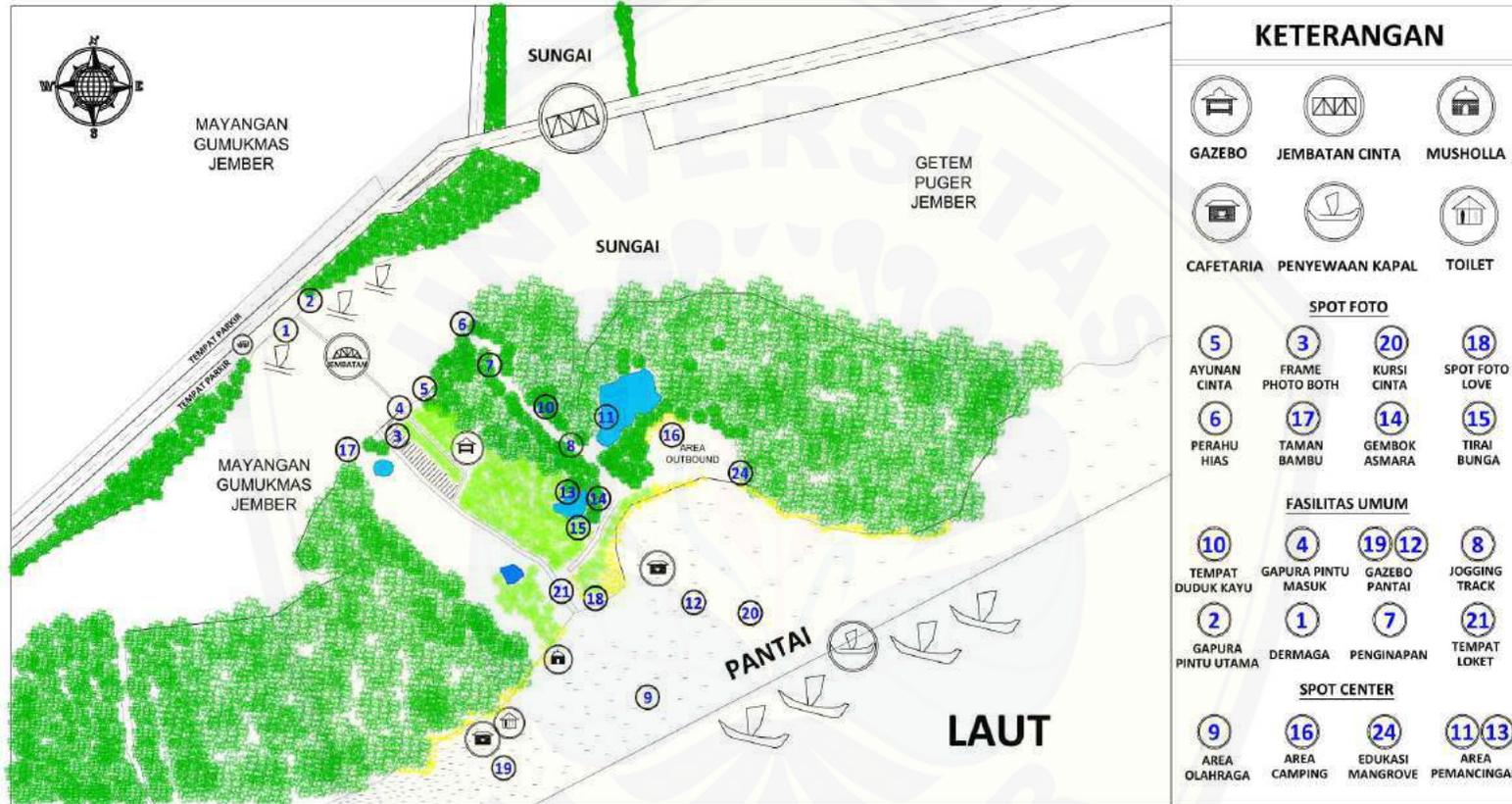
Focus Discussion Group mengenai Perencanaan Wisata Mangrove di Balai Desa Mayangan

Lampiran E. Portofolio Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove

***DOKUMEN
PERENCANAAN***

***“JEMBER MANGROVE
DESTINATION & EDUCATION”***

MAPS KAWASAN MANGROVE



PETA WISATA MANGROVE
SKALA 1 : 1000

MAYANGAN GUMUKMAS JEMBER	APPROVED : SULIMAH	KONSEP WISATA MAYANGAN	KETERANGAN
	CHECKED : RIYADI	KKN UNEJ	
	DRAFTER : MONICA DIESTI M.	GAMBAR TAMPAK ATAS	SITE PLAN

ECO WISATA MANGROVE

Bisnis Plan

Eksekutif Summary

Desa Mayangan yang terletak di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, menyimpan potensi wisata yang besar di daerah pesisir. Daerah pesisir Desa Mayangan ditumbuhi tanaman mangrove yang tertanam rapi di muara sungai, banyaknya tumbuhan mangrove mengundang berbagai ekosistem baru pada kawasan tersebut, seperti berbagai jenis burung, ikan, kerang, dan lain-lain.

Selain mangrove daerah pesisir Desa Mayangan juga ditanami cemara laut dan cemara udang. Dengan adanya tanaman tersebut, menjadikan pemandangan jauh lebih indah, udara menjadi bersih dan sejuk. Ditambah lagi lokasi yang dekat dengan *Nusa Barong* yang terkenal akan keindahan terumbu karang yang sengaja ditanam dan dibudidayakan menjadikan tempat tersebut tepat untuk dijadikan spot snorkeling maupun diving.

Karena banyaknya kekayaan alam yang ada dikawasan tersebut, membuka peluang bisnis dan usaha pariwisata bagi masyarakat Desa Mayangan. Kami merencanakan untuk memanfaatkan potensi mangrove dan membuka wisata dengan nama "*Jember Mangrove Destination (JMD)*". Penamaan dengan menyebut nama *Jember Mangrove Destination (JMD)* dikarenakan Desa Mayangan Gumukmas merupakan satu-satunya lokasi wisata yang menyuguhkan pemandangan tumbuhan mangrove di Jember.

Kawasan Mangrove Desa Mayangan akan dijadikan sebuah wisata mangrove dengan visi "terwujudnya kawasan wisata mangrove yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat desa Mayangan". Misi pengelolaan adalah:

1. Menciptakan pariwisata bahari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
2. Memberikan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat atau pengunjung wisata mangrove
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

Pengelolaan wisata mangrove mayangan dilakukan oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS), Kelompok Sadar Wisata

(POKDARWIS). Dalam pelaksanaannya, pengelola bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Dengan bekerjasama dengan masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kawasan wisata direncanakan akan ada penambahan wahana yang akan disuguhkan kepada pengunjung seperti pemancingan, jogging track, kolam renang air laut, camp area, edukasi penanaman laut, sport selfi, dan lain –lain



1. PENDAHULUAN

1.1 Visi

“Terwujudnya kawasan wisata mangrove yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat desa Mayangan”

1.2 Misi

“Misi dalam pengelolaan kawasan wisata Mayangan yaitu”:

1. Menciptakan pariwisata bahari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
2. Memberikan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat atau pengunjung wisata mangrove
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

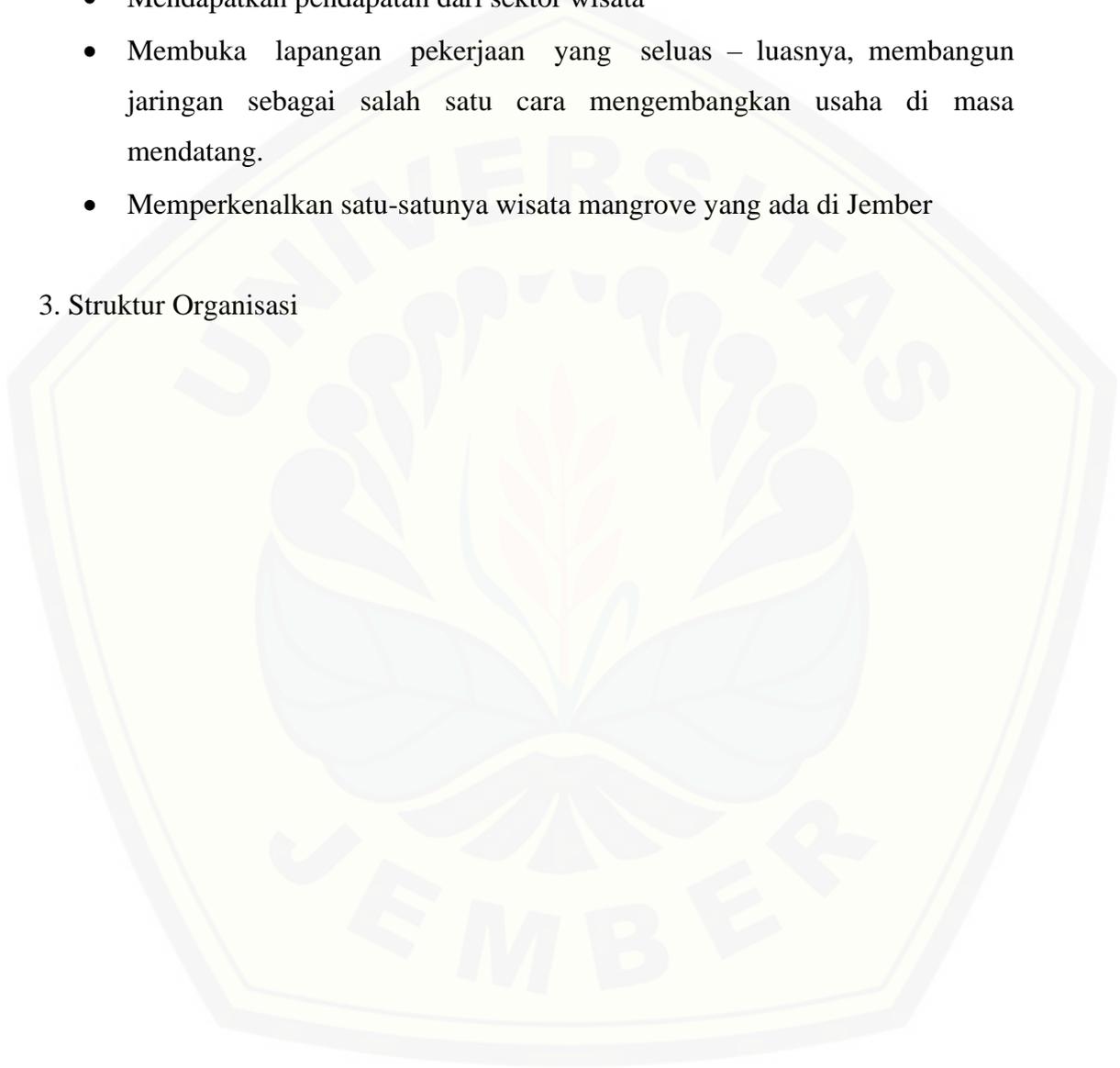
Kami sangat yakin bahwa prospek wisata ini akan berjalan dengan baik. Karena kami sudah merencanakan beberapa strategi salah satunya yaitu, mengembangkan kerjasama yang intensif melalui tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Kelompok Sadar wisata (POKDARWIS). Dalam kerjasama ini semua mempunyai peran penting dalam pelaksanaan wisata mangrove mayangan.

Kerjasama ini dilakukan dengan harapan masyarakat dapat memahami akan peluang usaha yang dapat dilakoni dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang berada didaerah tersebut. Kemudian melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang masih menjadi pengangguran untuk berpartisipasi dalam pengelolaan industri/pariwisata daerah setempat dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan cara memanfaatkanya, cara merawatnya, teknis pelaksanaanya dsb, selanjutnya yaitu menanamkan rasa sadar dan cinta akan warisan dan potensi pariwisata lokal. Dengan begitu masyarakat akan lebih antusias dalam berpartisipasi dan terlibat dalam industri dan pariwisata di daerah tersebut.

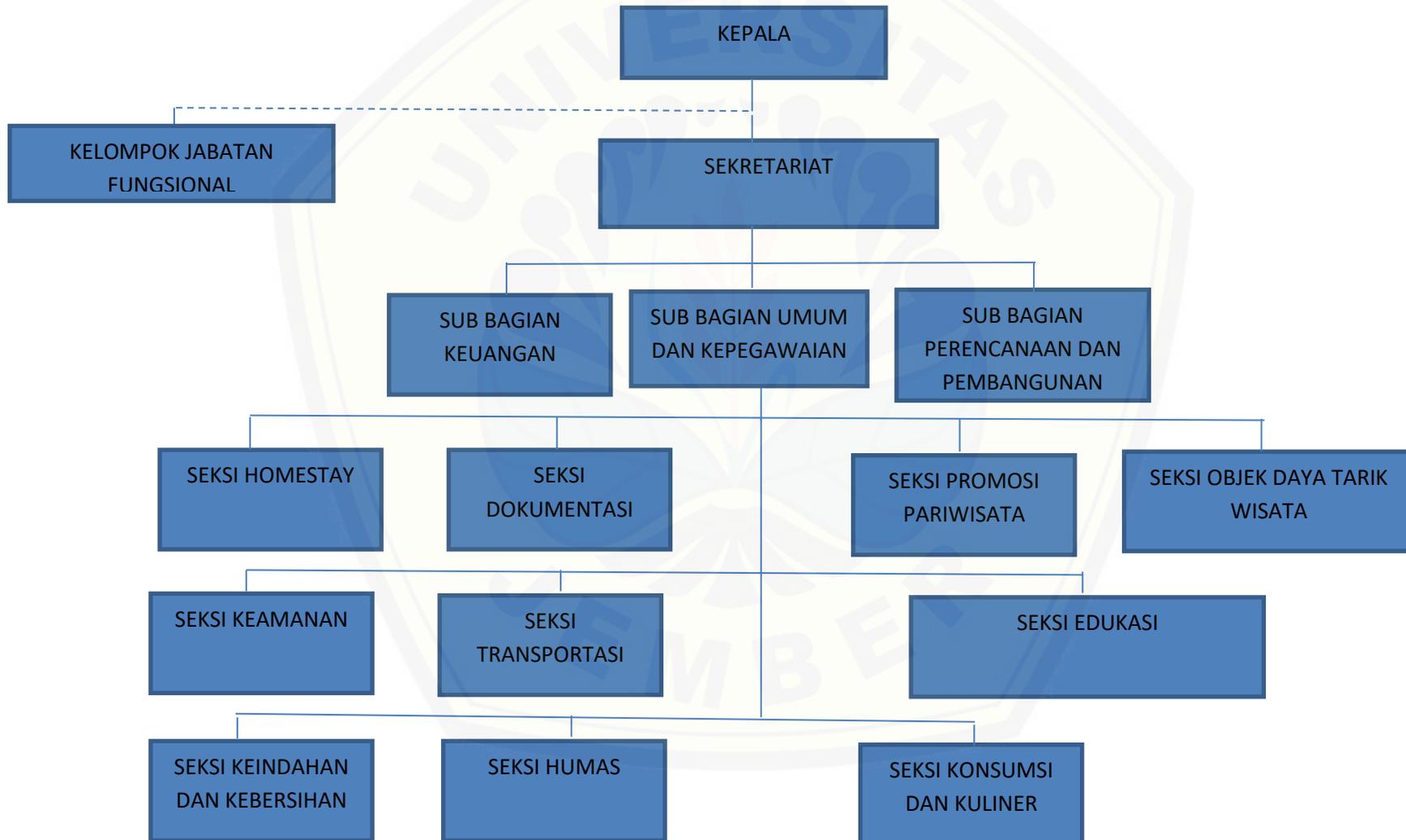
2. Tujuan / Sasaran Usaha

- Menciptakan serta mengembangkan potensi wisata mangrove di desa Mayangan
- Memberikan pengetahuan dan pelatihan cara merawat dan melestarikan mangrove kepada wisatawan dan masyarakat sekitar
- Mendapatkan pendapatan dari sektor wisata
- Membuka lapangan pekerjaan yang seluas – luasnya, membangun jaringan sebagai salah satu cara mengembangkan usaha di masa mendatang.
- Memperkenalkan satu-satunya wisata mangrove yang ada di Jember

3. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI



Tugas

1. Kepala bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Sekretariat, sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis di Lingkungan Pariwisata
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat-menyurat, kearsipan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai , pengembangan pegawai, mutasi, tata usaha kepegawaian.
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Pembukuan, perhitungan anggaran verifikasi dan pembendaharaan.
5. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
6. Seksi Homestay mempunyai tugas untuk menata akomodasi / Homestay untuk para wisatawan
7. Seksi Dokumentasi ini bertugas melakukan dokumentasi setiap pelaporan kegiatan yang berlangsung di lapangan dan diarsipkan. Juga menyediakan jasa foto buat pengujung untuk spot foto
8. Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan promosi pariwisata
9. Seksi Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
10. Seksi Keamanan bertugas untuk membangun suasana tertib, aman dan nyaman

11. Seksi Transportasi berfungsi untuk mengembangkan sistem transportasi untuk penghubung lokasi wisata
 12. Seksi Edukasi berfungsi untuk memberikan edukasi kepada pengunjung/wisatawan tentang cara menanam mangrove
 13. Seksi Keindahan dan Kebersihan berfungsi untuk mengatur dan menjaga agar lingkungan wisata selalu indah dan bersih
 14. Seksi Humas berfungsi untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan informasi organisasi kepada pihak luar
 15. Seksi Konsumsi dan Kuliner berfungsi untuk mengembangkan potensi makanan tradisional di daerah tempat wisata, serta mengelola kuliner yang dijual pada lokasi wisata
4. Analisis Pasar

1. Jasa yang ditawarkan

Jember merupakan daerah yang banyak menghasilkan lokasi wisata menarik terutama di daerah pesisir. Dengan daerah yang menghasilkan objek wisata berupa pantai yang berada di selatan Pulau Jawa, Jember belum memiliki daerah atau kawasan yang ditanami mangrove dan cemara. Daerah pesisir di Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas, merupakan satu – satunya kawasan yang ditamanami mangrove dan cemara yang ada di Jember. Kami yakin antusias warga Jember sangat besar akan wisata mangrove ini, karena merupakan objek wisata yang baru dan satu – satunya yang ada di Jember. Dengan penanaman yang sudah sangat rapi dan sudah dirancang untuk wisata semakin mempermudah dalam proses pengembangannya. Untuk tahapan selanjutnya akan dikembangkan dengan berbagai wahana yang akan dibangun di lokasi tersebut. Wahana yang direncanakan berupa Jogging Track yang masuk ke dalam rimbunnya hutan mangrove pada kawasan tersebut, serta dilengkapi dengan spot selfie untuk para wisatawan. Selain spot selfie yang akan dirancang, keindahan alam yang ada juga dapat diabadikan oleh wisatawan untuk berfoto yang kemudian dapat dibagikan kedia sosial. Pada perkembangan jaman saat ini, ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mengunjungi lokasi wisata biasanya untuk dipamerkan kedia sosial. Selain spot selfi, pada lokasi tersebut juga akan dibangun wahana lain

seperti tempat pemancingan, camp area, wisata perahu, futsal, voli, wisata edukasi, pelestarian penyu, terapi pasir panas, dan kolam renang air laut. Selain dapat memanjakan wisatawan juga dapat memberi edukasi tentang mangrove dan penyu pada wisatawan. Kawasan wisata tersebut juga akan menyediakan kapal untuk menyebrang ke Nusa Barong yang terkenal akan terumbu karangnya. Jadi pengunjung dapat melanjutkan wisatanya ke Nusa Barong untuk kegiatan Snorkeling maupun Diving.

2. Target Pasar yang dituju

Wisata ini akan dijalankan di Desa Mayangan Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember. Dengan sasaran utamanya adalah wisatawan masyarakat sekitar Jember maupun luar Jember. Karena wisata ini merupakan wisata yang tujuannya untuk wisata keluarga maka target pasar yang utama yaitu satu keluarga dari umur 5 tahun sampai 65 tahun pun bisa menjadi target pasar kita, disisi lain kita menyiapkan program edukasi yang ditujukan untuk anak usia 5 tahun sampai 13 tahun, dan kita juga menyediakan spot foto yang menarik bagi remaja usia 13 tahun sampai 26 tahun. dengan harapan dapat mengembangkan potensi wisata mangrove pertama yang ada di Jember.

5. Analisis SWOT

a. Strength

Adanya penggerak dalam melakukan penanaman mangrove yang merupakan salah satu program Internasional, terdapat organisasi kemasyarakatan yang mengelola mangrove dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian daerah, penanaman mangrove yang sudah tertata rapi di kawasan tersebut, terbentuknya ekosistem baru di sekitar mangrove dan cemara.

b. Weakness

Merupakan kawasan pantai selatan dengan adanya potensi gelombang tinggi, pasang surut air berpengaruh pada operasional penyebrangan

c. Opportunities

Potensi pengembangan mangrove yang sangat besar dapat menciptakan peluang wisata yang bagus, adanya larangan penebangan hutan mangrove

untuk menjaga kelestariannya, merupakan satu – satunya daerah yang ditanami mangrove yang berpotensi menjadi objek wisata di Jember.

d. Threat

Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan masih kurang, adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pelarangan penebangan mangrove, dan masih banyaknya perburuan satwa liar yang hidup disekitar mangrove.

6.Rencana Pemasaran

Secara umum memasarkan destinasi wisata atau obyek daya tarik wisata berarti mendesain agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan pengunjung (wisatawan). Dalam sebuah usaha, pemasaran adalah sesuatu yang paling penting agar usaha tersebut bisa terus berjalan. Begitu pula dalam pariwisata agar tetap dikunjungi oleh wisatawan perlu adanya strategi yang tepat sasaran.

Selain itu dari segi promosi juga menjadi penting, ketika kita berbicara tentang promosi, maka upaya untuk memperluas peluang pasar akan semakin besar jika kita mampu menggunakan media promosi dengan baik, efektif dan efisien. Beberapa promosi yang relatif murah yaitu melalui sosial media seperti facebook, instagram dan lain sebagainya. Promosi semacam ini selain gratis, kita bisa mencakup daerah lebih luas.

7. Rencana Pendanaan

A. Estimasi Biaya

1. Biaya Fasilitas Umum

NO	JENIS FASILITAS UMUM	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Gapura Pintu Utama	1	@Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
2	Gapura Pintu Masuk	1	@Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
3	Gazebo	10	@Rp 1.350.000 x 10	Rp 13.500.000,00
4	Gazebo pantai	20	@Rp 250.000 x 20	Rp 5.000.000,00
5	Jogging Track	1	@Rp	Rp

			50.000.000,00	50.000.000,00
6	Tempat duduk kayu	2	@Rp 1.500.000 x 3	Rp 4.500.000,00
7	Dermaga	1	@Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00
8	Penginapan	4	@Rp 30.000.000 x 3	Rp 120.000.000,00
9	Tempat Loket	1	@Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
10	Toilet Umum	2	@Rp 10.000.000 x 3	Rp 30.000.000,00
11	Mushola	1	@Rp 38.000.000,00	Rp 38.000.000,00
	Total Biaya			Rp 306.500.000,00

2 .Biaya Spot Selfi

NO	JENIS SPOT SELFIE	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Ayunan Cinta	2	@ Rp 250.000,00	Rp 500.000,00
2	Frame Photo Both	2	@ Rp 250,000,00	Rp 500.000,00
3	Kursi Cinta	8	@ Rp 1.250.000,00	Rp 10.000.000,00
4	Spot foto love	1	@ Rp 500.000,00	RP 500.000,00
5	Perahu Hias	5	@ Rp 800.000,00	Rp 4.000.000,00
6	Taman Bambu	1	@ Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
7	Gembok Asmara	1	@ Rp 7.000,000,00	Rp 7.000.000,00
8	Tirai Bunga	1	@ Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
9	Total Biaya			Rp 28.000.000,00

3. Biaya Spot Center

NO	JENIS SPOT CENTER	JUMLAH BIAYA
1	Tempat Voli	Rp 2.500.000,00
2	Area Sepak Bola	Rp 5.500.000,00
3	Area Camping	Rp 2.500.000,00
4	Wisata Perahu	Rp 25.000.000,00
5	Edukasi Mangrove	Rp 5.000.000,00
6	Area Pemancingan	Rp 20.000.000,00
7	Jumlah Biaya	Rp 60.500.000,00

Total biaya gedung dan bangunan secara keseluruhan, Rp 306.500.000 + Rp 28.000.000 = Rp 334.500.000, karena masa gedung dan bangunan kita asumsikan akan habis sekitar 10 tahun maka biaya penyusutan gedung dan bangunan = Rp 334.500.000 : 120 = Rp 2.787.500 per bulan

Total biaya peralatan secara keseluruhan adalah Rp 60.500.000, karena masa peralatan kita asumsikan akan habis sekitar 5 tahun, maka biaya penyusutan peralatan = Rp 60.500.000 : 60 = Rp 1.008.000 per bulan

4. Biaya Operasional Per Bulan

NO	Jenis Biaya	Total Biaya
1	Listrik dan Air	Rp 8.500.000,00
2	Gaji	Rp 26.500.000,00
3	Alat – alat Kantor	Rp 3.000.000,00
4	Lain-lain	Rp 15.000.000,00
5	Total Biaya	Rp 53.000.000,00

5. Proyeksi Pendapatan per Bulan

Untuk menentukan pendapatan per bulan kita mentargetkan untuk hari kerja (Senin – Jumat) akan dikunjungi sebanyak 50 orang per hari dengan tiket masuk sebesar Rp 5.000,00. Untuk *weekend* (Sabtu dan Minggu) kita mentargetkan akan dikunjungi sebanyak 100 orang per hari dengan tiket masuk Rp 10.000,00. Untuk parkir motor dan mobil kita buat perbandingan 60% untuk pengunjung per bulan yang membawa motor dan 40% pengunjung per bulan yang membawa mobil dengan asumsi pengunjung yang membawa motor berbonceng dua orang dan mobil membawa 5 orang. Untuk pendapatan dari penginapan dan

camping sekitar 5% dari jumlah pengunjung per bulan untuk masing – masing wahana, dimana untuk penginapan kita menyediakan tempat untuk 4 orang. Untuk camping daftar perkelompok dengan maksimal perkelompok 5 orang. Penyewaan wahana perahu kita targetkan untuk paket A 5%, paket B 20%, paket C 10%, dan paket D 15% dari jumlah pengunjung per bulan. Paket edukasi kita targetkan 3 kali per bulan yang terdiri dari 40 orang per paket, untuk paket 1 kita targetkan ada 2 kelompok, sedangkan paket 2 kita targetkan ada 1 kelompok.

NO	NAMA	HARGA	TOTAL
1	Tiket Masuk weekday	Rp 5.000,00/org	Rp 5.500.000,00
2	Tiket Masuk weekend	Rp 10.000,00/org	Rp 8.000.000,00
3	Tiket Penyeberangan	Rp 5.000,00/org	Rp 9.500.000,00
4	Karcis Parkir Motor	Rp 2.000,00	Rp 1.140.000,00
5	Karcis Parkir Mobil	Rp 5.000,00	Rp 700.000,00
6	Penginapan	Rp 250.000,00/mlm	Rp 5.000.000,00
7	Camping	Rp 150.000,00/klp	Rp 3.000.000,00
8	Perahu :		
	1. Tipe A Kano	Rp 100.000,00/org	Rp 9.500.000,00
	2. Tipe B Dayung	Rp 150.000,00 (2 org)	Rp 28.500.000,00
	3. Tipe C Hias	Rp 200.000,00 (6 org)	Rp 6.400.000,00
	4. Tipe D Mesin	Rp 100.000,00 (6 org)	Rp 4.800.000,00
9	Sewa Voli Pantai	Rp 80.000,00/jam	Rp 7.200.000,00
10	Sewa Bola Pantai	Rp 80.000,00/jam	Rp 7.200.000,00
11	Paket Edukasi:		
	Paket 1	Rp 30.000,00/org	Rp 2.400.000,00
	Paket 2	Rp 50.000,00/org	Rp 2.000.000,00
	Total Pendapatan		Rp 93.640.000,00

Untuk laba per bulan Rp 93.640.000,00 dikurangi total biaya sebesar 56.795.500,00. Sehingga laba bersih per bulan senilai Rp 36.844.500,00.

PERATURAN DESA MAYANGAN

NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

PENGELOLAAN WISATA MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANGAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa hutan mangrove di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember merupakan potensi sumber daya alam yang harus didayagunakan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa kegunaan yang diperoleh dari padanya, antara lain sebagai perlindungan pantai terhadap angin, ombak dan abrasi, pencegahan intrusi air laut, tanggul alam terhadap ombak dan angin, pelestarian flora dan fauna, mempertahankan habitat biota perairan dan berpotensi menjadi pemasukan bagi desa melalui program wisata sehingga Pemerintah Desa berkepentingan menjaga dan mengelola kelestariannya;
 - c. bahwa hutan mangrove desa mayangan yang berpotensi sebagai obyek wisata belum dikelola secara maksimal sehingga perlu dilakukan serangkaian upaya pengelolaan secara optimal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Desa tentang pengelolaan wisata mangrove.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41)

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299)
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E)
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Tahun 1005 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7)

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
Kepala Desa Mayangan**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA MAYANGAN TENTANG
PENGELOLAAN WISATA MANGROVE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jember
4. Kecamatan adalah Kecamatan Gumukmas
5. Desa adalah Desa Mayangan
6. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
7. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember dan Daerah Kota
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
11. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa

12. Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Pengelola adalah pemerintah desa, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Masyarakat dan pihak ketiga (investor)
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penata usahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
15. Hutan Mangrove adalah tipe hutan yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin di sepanjang pantai, muara sungai, teluk dangkal, delta, bagian yang terlindung dari tanjung dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada kawasan tropis dan subtropis;
16. Pengelolaan mangrove adalah kegiatan perencanaan, peruntukan, penggunaan, pelestarian dan pengawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sedapat mungkin melibatkan peran serta masyarakat;
17. Pelestarian Hutan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru, dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya;
18. Pemanfaatan hutan mangrove adalah kegiatan pengambilan manfaat dari hutan mangrove yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara selektif dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan kelayakan pengusaha hutan mangrove;
19. Intrusi adalah proses masuknya air laut ke dalam sistem perairan air tawar akibat terjadi ketidak sesuaian hidrologi;

20. Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari semua spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, suatu proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya;
21. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang mencakup informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada;
22. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman organisme atau jenis yang mempunyai susunan yang tertentu;
23. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk kepada keberadaan habitat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wisata mangrove berazaskan manfaat dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan wisata mangrove adalah :

- a. Melindungi dan melestarikan potensi serta fungsi hutan mangrove untuk seluruh kawasan yang ditetapkan sehingga keberadaannya sebagai sumber daya (aset) untuk pembangunan terus berlanjut;
- b. Memaksimalkan seluruh fungsi hutan mangrove;
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove;
- d. Menjamin pemanfaatan yang berkeadilan dan lestari;
- e. Mengembangkan data dan informasi keanekaragaman hayati hutan mangrove serta potensi manfaatnya sebagai landasan utama bagi pengelolaan hutan mangrove secara lestari.

- f. Memaksimalkan potensi wisata mangrove ada di desa mayangan untuk pemasukan kas daerah, desa maupun peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan wisata mangrove meliputi pelestarian dan pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan dengan berdasarkan pada tata ruang kawasan pesisir dan disusun atas karakteristik, kesesuaian dan dengan memperhatikan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem hutan mangrove.

BAB IV PELESTARIAN

Pasal 5

Panjang kawasan pantai berhutan mangrove \pm 2 hektar nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah dari tepi pantai.

Pasal 6

Setiap orang/badan dilarang :

- a. Melakukan penebangan atau memungut hasil hutan di kawasan pelestarian hutan mangrove tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan mangrove yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan mangrove yang diambil atau dipungut tidak sah;

- c. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- d. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan mangrove;
- e. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang;
- f. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan wisata hutan mangrove tanpa persetujuan pemerintah desa maupun pengelola.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Pemanfaatan hutan mangrove diselenggarakan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan kekayaan pengusaannya.

- (1) Pemanfaatan dalam kawasan wisata mangrove hanya dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan secara terbatas meliputi:
 - a. Kegiatan ekowisata;
 - b. Kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. Kegiatan pengamanan hutan;
 - d. Kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan kelestarian wisata mangrove.
- (2) Pengelolaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersifat komersial wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan wisata mangrove kepada desa;
- (3) Pengaturan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan di sekitar kawasan hutan mangrove harus sesuai dengan fungsi hutan mangrove;
- (2) Masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove berhak mendapat kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai kompensasi atas pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Batas kawasan sekitar kawasan hutan mangrove dan bentuk pengaturan kegiatan yang sesuai dengan fungsi hutan mangrove ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

Pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 diatas dilaksanakan oleh pengelola yang terdiri dari :

- a. Pemerintah desa
- b. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- c. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
- d. Masyarakat
- e. Dan pihak ketiga (Investor)

BAB VI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10

Pembagian keuntungan antar pengelola kawasan wisata mangrove selengkapnya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berhak :

- a. Memperoleh kenikmatan, keindahan dan kenyamanan (tempat rekreasi) pada daerah terbatas;
- b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan informasi hutan mangrove;
- c. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan wisata mangrove;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wisata mangrove.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. Memelihara lingkungan wisata sekitar mangrove;
- b. Ikut serta memelihara dan menjaga kawasan wisata dari gangguan dan perusakan mangrove;
- c. Menyebarkan informasi yang berkaitan pengelolaan wisata mangrove kepada seseorang/masyarakat;
- d. Menjaga aset pengelolaan seperti papan pengumuman, pos dan lain-lain;
- e. Membantu pemerintah dalam mengamankan wisata mangrove dari kegiatan penebangan liar, perubahan fungsi hutan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar hutan;
- f. Membantu melakukan rehabilitasi kawasan mangrove;
- g. Melaporkan luas lahan di kawasan pelestarian wisata mangrove yang dikuasai;

- h. Menghijaukan lahan di kawasan pelestarian wisata mangrove yang dikuasai minimal 40% (enam puluh persen) dari luas lahan yang dikuasai.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b, c, d, dan f, diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e, diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d, g dan h Peraturan Desa ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kejahatan;
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Guna melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa ini dapat dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Disahkan di Desa Mayangan
pada tanggal2018
KEPALA DESA MAYANGAN

SULIMAH S.Pd

Diundangkan di Desa Mayangan
pada tanggal2018
SEKRETARIS DESA MAYANGAN

TINO

FASILITAS UMUM

1. Gapura Pintu Utama



- Pada bagian depan gapura terdapat nama dari wisata mangrove yang telah disetujui.
- Gapura dibangun melintang di pinggir jalan dengan ukuran 4 x 1,5 x 0,4 m.
- Bahan yang digunakan untuk pembuatan gapura menggunakan semen, batako, batu, batu alam (hiasan), dan cat.

2. Gapura Pintu Masuk



- Gapura pintu masuk terdapat tulisan **“pintu kemana saja wisata mangrove”**

- Bahan yang digunakan dalam pembuatan gapura pintu masuk adalah limbah pohon yang masih, cat pernis, batu, lempengan kayu, cat kayu
- Pintu Masuk berukuran lebar 2 m, tinggi 2,5 m.

3. Gazebo



- Bahan yang digunakan untuk gazebo terbuat dari kayu jati.
- Ukuran Gazebo 2 x 3 x 2 m.

4. Area Jalan Setapak



- Bahan yang digunakan yaitu dari potongan kayu ulin/ merbau.
- Ukuran lebar jalan 2 m.

5. Tempat Duduk



- Bahan yang digunakan yaitu dari limbah kayu mahoni
- Tempat duduk berukuran dengan panjang 1,5m.

6. Dermaga



- Bahan terbuat dari papan kayu jati.
- Ukuran dermaga 2 x 2 m, dengan ukuran tangga dermaga 2 x 0.5 m.

7. Toilet



- Toilet dengan ukuran 5 x 4 m.

8. Musholah



- Musholah dengan ukuran 5 x 5 m.

9. Penginapan



- Ukuran masing-masing penginapan 5 x 3,5 m.



10. Tempat Locket

- Ukuran Locket berukuran 3 x 2 m.

11. Desain Stan Kuliner



- Masing-masing stan berukuran 3 x 2 m.

12. Kantor pelayanan

- Ukuran bangunan kantor pelayanan 4 x 3 m.

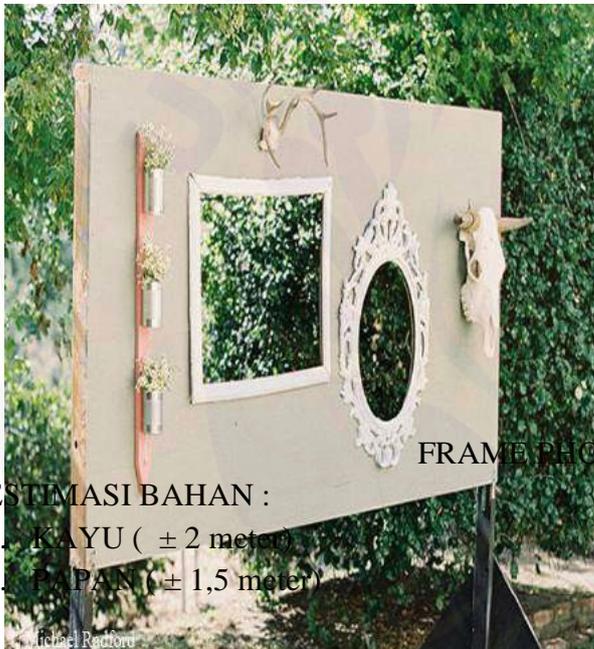


SELFIE SPOTS



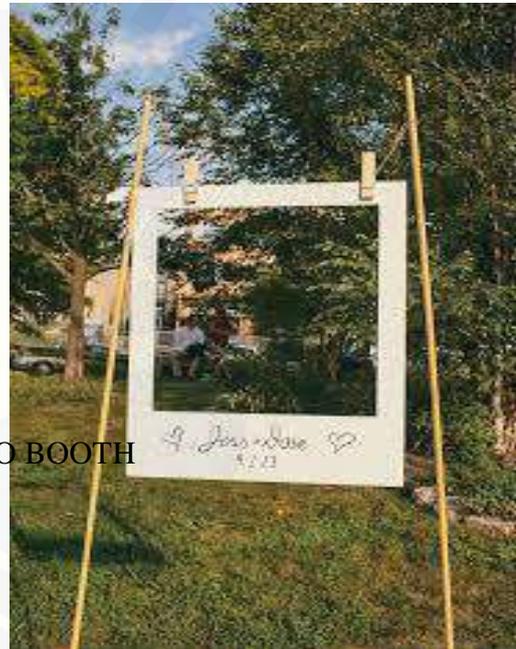
ESTIMASI BAHAN :

1. KAYU (± 3 meter)
2. TALI TAMPAR (± 2 meter)
3. PAPAN (± 1,5 meter)



ESTIMASI BAHAN :

1. KAYU (± 2 meter)
2. PAPAN (± 1,5 meter)





GKU

ES

- 1.
- 2.

- BAHAN TAMBAHAN :
PAPAN / KAYU DI BENTUK HATI DAN DILETAKKAN DITENGAH PAPAN
BANGKU



SPOT FOTO TULISAN

ESTIMASI BAHAN

1. BAMBU
2. BUNGA



ESTIMASI BAHAN

1. KAYU
2. BUNGA



ESTIMASI BAHAN

1. BOTTLE
2. KAYU
3. BUNGA
4. BURUNG MERPATI TIRUAN



ESTIMASI

1. PEL
2. CA
3. HIA



TAMAN BAMBU

ESTIMASI BAHAN :

1. BAMBU
2. TANAMAN / BUNGA-BUNGA
3. ORNAMEN TULISAN

ESTIMAS

1.

•



ESTIMAS

1. KA

2. KE

3. KA



ESTIMASI BAHAN :

1. BAN-BAN BEKAS
2. CAT
3. TALI



ESTI
1.
2.



ESTI
2

Cafeteria JMD (Jember Mangrove Destination & Education)

Menu yang disajikan dapat dikategorikan :

- a. Berbagai macam olahan potensi desa
- b. Berbagai macam olahan sea food
- c. Berbagai macam olahan makanan tradisional
- d. Berbagai macam olahan makanan modern
- e. Berbagai macam olahan mangrove

Deskripsi :

- a. Desa mayangan memiliki potensi unggulan desa yakni berupa buah semangka. Buah ini dapat dimanfaatkan daging buahnya menjadi minuman instan, keripik semangka, selai semangka. Selain itu kulit semangka yang selama ini belum dimanfaatkan dan menjadi limbah juga dapat dimanfaatkan sebagai permen manis yang biasanya disukai anak-anak sehingga pemanfaatan buah semangka tidak meninggalkan limbah.
- b. Konsep cafeteria juga dapat menyertakan menu olahan sea food, hal ini dikarenakan letak desa mayangan yang dekat dengan pesisir sehingga terdapat peluang yang besar untuk menyuguhkan menu ini. Menu sea food yang disajikan diantaranya berbagai macam ikan bakar, kepiting, cumi, udang dll.
- c. Makanan tradisional juga dapat disajikan di konsep cafeteria JMD. Resep makanan tradisional ini juga bisa disajikan sesuai dengan khas desa mayangan.
- d. Makanan modern juga bisa jadi alternatif untuk konsep cafeteria JMD. Olahan makanan modern ini contohnya kentang goreng, burger, kebab, roti bakar dll.
- e. Desa mayangan memiliki potensi wisata yakni hutan mangrove, dimana daun mangrove dapat dimanfaatkan sebagai keripik, sirup dan dodol mangrove.

Selain berbagai macam olahan yang disajikan, untuk mendukung wisata JMD juga diperlukan adanya sebuah toko yang menyediakan pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh ini bisa makanan atau kerajinan tangan, seperti sebagai berikut:

- Berbagai Macam Olahan Buah Semangka



➤ Berbagai Macam Olahan Sea Food



➤
➤
➤
➤

➤ Olahan Makanan Tradisional



➤ Olahan Makanan Modern



➤ Macam-macam Olahan Tanaman Mangrove



Spot Area *Jember Mangrove Destination & Education*

1. Area Camping



- a. Menggunakan tenda berukuran 3m x 2m
- b. Ditata menghadap ke selatan sehingga mendapatkan view laut lepas dan pulau nusa barong
- c. Tenda-tenda ditata membentuk setengah lingkaran dikawasan area camping
- d. Pengunjung diperkenankan untuk membawa tenda sendiri
- e. Untuk pengunjung yang membawa tenda sendiri dapat didirikan berdasarkan arahan petugas
- f. Estimasi biaya untuk pengadaan tenda dengan harga pertenda \pm Rp. 250.000 maka untuk pengadaan 10 tenda memerlukan biaya Rp. 2.500.000

2. Edukasi Penanaman Mangrove



- a. Lokasi penanaman mangrove dapat dipusatkan disebelah utara tempat wisata

b. Edukasi penanaman mangrove di tawarkan dengan 2 macam paket yaitu :

- Paket A
 - Harga Rp. 30.000
 - Fasilitas :
 - ❖ Tiket masuk & lahan penanaman
 - ❖ 1 bibit pohon mangrove
 - ❖ Penyeberangan
- Paket B
 - Harga Rp. 50.000
 - Fasilitas :
 - ❖ Tiket masuk & lahan penanaman
 - ❖ 1 bibit pohon mangrove
 - ❖ Penyeberangan
 - ❖ Pemberian nama pada bibit pohon yang ditanam tersebut

3. Wisata Perahu



- a. Wisata perahu diletakkan di sungai bagian utara (dekat jembatan penyeberangan) dengan area dari barat ke timur
- b. Wisata perahu dilengkapi dengan 4 jenis perahu yaitu perahu sport (kano), perahu dayung untuk dua orang, perahu getek dengan petugas untuk mendayung dan perahu bermesin.
- c. Harga sewa kapal untuk tipe A (kano) Rp. 100.000, untuk tipe B (perahu dayung untuk dua orang) Rp. 150.000, untuk tipe C (perahu getek dengan petugas dayung) Rp. 200.000 dan untuk tipe D (perahu mesin) Rp. 100.000
- d. Setiap jarak 250m akan disediakan checkpoint dimana pengunjung dapat berhenti dan menikmati spot foto disediakan.

4. Area Olahraga (Volly Pantai, Futsal Pantai)



- Dibangun didaerah pantai sebelah barat yang memiliki pantai yang luas
- Untuk futsal pantai dan volly pantai dibangun tidak permanen untuk menghindari jika ada ombak datang
- Fasilitas lapangan futsal dan volly disewakan dengan hitungan per jam, dimana per jam disewakan dengan harga Rp. 80.000/jam.

TIKET PARKIR

JEMBER MANGROVE DESTINATION & EDUCATION



LAMPIRAN F. SURAT IJIN PENELITIAN LEMLIT UNIVERSITAS JEMBER



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5504 /UN25.3.1/LT/2018

18 Desember 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jember

Di

Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4920/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Maghfira Nurmala Sari
NIM : 150910301021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Jawa Gg.VI No.8/A Summersari-Jember
Judul Penelitian : "Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal"
Lokasi Penelitian : Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kab. Jember
Lama Penelitian : 3 Bulan (21 Desember 2018-30 Maret 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

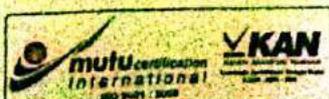


Dr. Soeanto, M.Pd.

NIP. 196306161988021001

Terbusan Yth

1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs; ✓
3. Arsip.



CERTIFICATE NO : CMB/173

LAMPIRAN G. SURAT REKOMENDASI BANGKESBANGPOL KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Gumukmas Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/3100/415/2018

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 5504/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Maghira Nurmala Sari /150910301021
Instansi : FISIP Universitas Jember
Alamat : Jl. Jawa Gg. VI No. 8/A Sumbersari, Jember
Keperluan : Melaksanakan penelitian dengan judul : "Perencanaan Destinasi Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal"
Lokasi : Kantor Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Desember 2018 s/d s/d Maret 2019

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 21-12-2018
An. KEPALA BANGKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
d. Kajian Strategis dan Politik
ACHMAD M. F., S.Sos
Pegawa
NIP. 19690912199602 1001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN H. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN KECAMATAN GUMUKMAS



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS

Jalan Ahmad Yani No.224 Telp. 0336-321042

GUMUKMAS

Kode Pos : 68165

Gumukmas, 21 Januari 2019

Nomor : 072/ 16 /35.09.04/2019 Kepada:
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa Mayangan
Lamp : - di -
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian GUMUKMAS

- Dasar: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
3. Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 5504/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Penelitian.

Berkaitan hal tersebut di atas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku dimohon dengan hormat sarudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud kepada Maghira Nurmala Sari dari Universitas FISIP Jember terhitung mulai Desember 18 s/d Maret 2019.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

4. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan pendidikan
5. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
6. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan disampaikan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan Kerjasamanya disampaikan terima kasih.

